



Laporan Perekonomian Provinsi Aceh

NOVEMBER 2024

KPw BI Provinsi Aceh

VISI

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas BI dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

MISI

Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

FUNGSI

1. Fungsi *Advisory* Kebijakan
2. Fungsi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
3. Fungsi Sistem Pembayaran
4. Fungsi Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
5. Fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS)
6. Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
7. Fungsi Pengawasan SP dan PUR
8. Fungsi Komunikasi Kebijakan

TUGAS POKOK

1. Memberikan masukan kepada Dewan Gubernur kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
2. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset serta memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM
3. Melaksanakan kegiatan perizinan dan pengawasan serta operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan kebijakan stabilitas keuangan, program perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung fungsi-fungsi utama.

Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia

Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku “Laporan Perekonomian Provinsi Aceh November 2024” ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi baik untuk internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan III 2024 tumbuh 5,17% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera (4,48% yoy) maupun Nasional (4,95% yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Provinsi Aceh. Hal ini tercermin dari meningkatnya kinerja berbagai Lapangan Usaha (LU) terkait yaitu LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
2. Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 3,09% (yoy). Melandainya tekanan inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024, terutama bersumber dari deflasi komoditas makanan cabai merah dan penerapan diskon tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diterapkan pasca kenaikan tarif pada Juni 2024. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan cukai rokok dan tembakau, tarif air PDAM setelah diskon harga, serta berlanjutnya peningkatan harga emas perhiasan.
3. Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,37%-5,17% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.
4. Sementara itu, laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Prospek terkendalinya inflasi Provinsi Aceh pada tahun 2024 didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID se-Aceh.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, November 2024
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Rony Widijarto P.
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	1
1.1. GAMBARAN UMUM	2
1.2. SISI PERMINTAAN	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	7
BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	15
2.1. GAMBARAN UMUM	16
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	16
2.3. BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT	17
BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	20
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	21
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	21
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN III 2024.....	26
3.4. INFLASI SPASIAL.....	26
3.5. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	28
BAB 4. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM	30
4.1. KINERJA PERBANKAN	31
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	32
4.3. STRATEGI DALAM MENDORONG PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DI ACEH	35
BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	37
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	38
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI	38
5.3. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB)	41
5.4. PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DAN PKH	43
BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....	45
6.1. KETENAGAKERJAAN	46
6.2. KEMISKINAN	47
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	50
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI	51
7.2. PROSPEK INFLASI	53
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN	53
DAFTAR ISTILAH	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan III 2024	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi	3
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan III 2024	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	3
Grafik 1.5 Perkembangan Penjualan Kendaraan	4
Grafik 1.6 Perkembangan Pembiayaan Konsumsi	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	4
Grafik 1.8 Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan	4
Grafik 1.9 Perkembangan Realisasi APBD	5
Grafik 1.10 Pertumbuhan PMTB	5
Grafik 1.11 Perkembangan Pembiayaan Investasi	5
Grafik 1.12 Pertumbuhan Ekspor Barang & Jasa	5
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Batubara	6
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh	6
Grafik 1.15 Pertumbuhan Impor Barang & Jasa	6
Grafik 1.16 Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri	7
Grafik 1.17 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan III 2024	7
Grafik 1.18 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	7
Grafik 1.19 Perkembangan Produksi Padi	8
Grafik 1.20 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	8
Grafik 1.21 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	8
Grafik 1.22 Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan	8
Grafik 1.23 Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan	9
Grafik 1.24 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	9
Grafik 1.25 Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi	9
Grafik 1.26 Perkembangan Pengadaan Semen	9
Grafik 1.27 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan	10
Grafik 1.28 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	10
Grafik 1.29 Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	10
Grafik 1.30 Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda	10
Grafik 1.31 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11
Grafik 1.32 Perkembangan Penggunaan Listrik Industri	11
Grafik 1.33 Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan	11
Grafik 1.34 Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin	11
Grafik 1.35 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	12
Grafik 1.36 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar	12
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh	17
Grafik 3.1 Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan III 2024	21
Grafik 3.2 Sasaran Produksi Komoditas Cabai Merah Tahun 2024 (ton)	22

Grafik 3.3 Perkembangan Harga Emas Dunia	25
Grafik 3.4 Perkembangan Survei Konsumen	26
Grafik 3.5 Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% , yoy).....	27
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank).....	31
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga	31
Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)	31
Grafik 4.4 Perkembangan <i>Non-Performing Financing</i> (Berdasarkan Lokasi Bank).....	32
Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank).....	32
Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)	32
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank).....	32
Grafik 4.8 Perkembangan DPK berdasarkan Jenis.....	33
Grafik 4.9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan.....	33
Grafik 4.10 Perkembangan DPK Perseorangan	33
Grafik 4.11 Perkembangan DPK Pemerintah.....	33
Grafik 4.12 Perkembangan DPK Korporasi	34
Grafik 4.13 Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek).....	34
Grafik 4.14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan.....	34
Grafik 4.15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha	35
Grafik 4.16 Perkembangan Pembiayaan UMKM	35
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas (Rp Triliun)	38
Grafik 5.2 Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	38
Grafik 5.3 Temuan Uang Palsu	38
Grafik 5.4 Perkembangan Nominal SKNBI	39
Grafik 5.5 Perkembangan Volume SKNBI	39
Grafik 5.6 Perkembangan Nominal BI-RTGS	39
Grafik 5.7 Perkembangan Volume BI-RTGS	40
Grafik 5.8 Transaksi ATM Debit	40
Grafik 5.9 Transaksi Kartu Kredit	40
Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi UE	41
Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS	41
Grafik 5.12 Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	41
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB	42
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA	42
Grafik 5.15 Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)	43
Grafik 5.16 Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)	43
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal)	44
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM)	44
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera	46
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	48
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Wilayah Sumatera	48
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan III 2024	16
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan III 2024	17
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan III 2024.....	17
Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan III 2024	18
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan III 2024	18
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan III 2024.....	19
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan III 2024	19
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang dan Jasa.....	21
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	21
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	22
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	22
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga	23
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	23
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	23
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	24
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	24
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan	24
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	25
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	25
Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh	27
Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe	27
Tabel 3.15 Andil Inflasi di Kota Meulaboh	27
Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang	27
Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah	27
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	46
Tabel 6.2 Perkembangan TPT	46
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	46
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan	47
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani	47
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	49
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan	49
Tabel 7.1 <i>Global Economic Growth Outlook</i>	51

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Sektoral (Rp Triliun)	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,80	10,19	10,03	11,61	10,49	9,83	10,07
Pertambangan dan Penggalian	2,47	2,57	2,72	2,57	2,58	3,01	2,91
Industri Pengolahan	1,49	1,60	1,61	1,67	1,56	1,62	1,66
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Konstruksi	3,15	3,20	3,56	4,11	3,30	3,47	3,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	5,56	5,69	6,27	5,83	5,84	5,92
Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,49	2,47	2,43	2,59	2,88	2,95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,55	0,56	0,59	0,55	0,55	0,59
Informasi dan Komunikasi	1,63	1,63	1,62	1,63	1,64	1,65	1,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,56	0,37	0,37	0,57	0,56	0,57	0,59
Real Estate	1,48	1,48	1,62	1,52	1,56	1,56	1,62
Jasa Perusahaan	0,23	0,22	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	3,25	3,13	3,25	3,03	3,48	3,33
Jasa Pendidikan	0,97	1,03	0,97	0,94	0,99	1,04	1,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	1,26	1,33	1,21	1,13	1,28	1,38
Jasa lainnya	0,57	0,61	0,62	0,55	0,57	0,63	0,64
PDRB	35,01	36,09	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)

Sektoral Growth (% , yoy)	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75	5,66	7,70	8,54	7,04	-3,55	0,38
Pertambangan dan Penggalian	-6,21	-5,28	-1,82	-6,10	4,67	17,24	6,86
Industri Pengolahan	4,40	-4,90	-2,89	-1,97	4,69	1,50	2,92
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	4,92	7,46	7,94	8,85	9,22	4,86	4,49
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,78	4,84	5,31	2,00	6,44	0,31	0,89
Konstruksi	3,60	7,84	1,36	2,65	4,87	8,54	6,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,72	5,53	9,68	10,23	1,68	4,91	3,96
Transportasi dan Pergudangan	3,77	10,41	9,47	6,27	10,65	15,69	19,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,32	7,09	5,38	9,16	3,76	0,97	6,36
Informasi dan Komunikasi	11,08	8,01	0,18	0,90	0,45	1,13	5,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	-6,89	-17,30	-26,95	5,14	-0,38	52,01	58,69
Real Estate	4,06	3,89	2,09	4,72	5,09	4,95	0,10
Jasa Perusahaan	4,07	-5,62	-2,31	-0,02	2,79	6,77	7,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,66	6,81	-5,78	-0,39	9,08	7,17	6,39
Jasa Pendidikan	2,18	7,76	6,76	-8,47	1,72	1,65	6,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,58	-2,02	8,69	-3,48	-5,74	1,39	3,70
Jasa lainnya	5,75	9,14	8,49	-0,81	0,25	3,10	4,09
PDRB	4,64	4,37	3,78	4,15	4,82	4,54	5,17

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran (Rp Triliun)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
- Konsumsi Rumah Tangga	19,43	19,98	19,99	20,03	20,39	20,83	20,76
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,67	0,67	0,67	0,83	0,87	0,75	0,80
- Konsumsi Pemerintah	3,39	5,91	5,83	7,17	4,09	6,32	6,14
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,49	11,73	12,01	12,32	11,57	12,55	12,77
- Perubahan Inventori	0,37	-0,34	0,42	-0,16	0,35	-0,12	0,13
- Ekspor Barang dan Jasa	16,36	18,87	20,11	21,42	18,10	18,16	21,61
- Impor Barang dan Jasa	16,70	20,73	22,42	22,38	18,67	20,76	23,72
PDRB	35,01	36,09	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen Growth (% , yoy)	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
- Konsumsi Rumah Tangga	3,14	3,31	4,06	5,80	4,93	4,24	3,85
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	5,14	4,81	0,59	21,88	29,34	10,67	18,95
- Konsumsi Pemerintah	0,85	10,26	1,41	-8,74	20,83	6,94	5,37
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,46	7,78	5,50	4,88	0,73	7,02	6,32
- Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
- Ekspor Barang dan Jasa	-0,36	12,10	18,03	18,24	10,63	-3,77	7,46
- Impor Barang dan Jasa	-0,32	12,02	19,56	13,30	11,82	0,10	5,77
PDRB	4,64	4,37	3,78	4,15	4,82	4,54	5,17

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi ⁴ (% , yoy)	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Banda Aceh	5,32	2,70	1,40	1,53	2,52	2,07	1,84
Lhokseumawe	5,35	2,69	2,55	1,56	2,79	2,97	2,11
Meulaboh	6,27	2,69	2,10	1,42	4,39	3,94	2,40
Aceh Tamiang					3,38	3,14	0,99
Aceh Tengah					4,51	4,78	0,47
Provinsi Aceh	5,46	2,70	1,83	1,53	3,25	3,09	1,50

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Total Aset (Rp Triliun)	51,04	52,03	53,77	57,84	56,03	57,67	59,99
Pertumbuhan (yoy)%	2,35	-1,66	2,26	8,68	9,78	10,85	11,57
DPK (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	35,42	36,10	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52
Pertumbuhan (yoy)%	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45
FDR %	90,87	92,90	94,02	92,00	94,38	94,14	95,14
NPF-gross %	1,82	1,96	1,80	1,57	1,68	1,61	1,64
NPF-Nominal (Rp Triliun)	0,64	0,71	0,67	0,61	0,66	0,66	0,70

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

⁴ SBH 2022

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Total (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11
Giro (Rp Triliun)	6,90	6,73	8,19	5,70	7,92	8,81	10,51
Pertumbuhan (yoy)%	-34,94	-27,23	12,33	-9,66	14,71	30,85	28,41
Tabungan (Rp Triliun)	21,55	22,52	22,07	24,99	22,99	24,35	24,19
Pertumbuhan (yoy)%	6,27	4,97	3,43	4,33	6,71	8,12	9,60
Deposito (Rp Triliun)	10,53	9,61	9,62	11,24	10,48	10,19	10,00
Pertumbuhan (yoy)%	38,94	-7,63	-13,23	19,87	-0,47	6,08	3,98

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Total Kredit (Rp Triliun)	35,42	36,1	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52
Pertumbuhan (yoy) %	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,51	66,14	6,75	6,82	6,52	7,19	7,43
Pertumbuhan (yoy)%	-11,27	-12,79	-7,06	0,14	0,05	8,65	10,07
Investasi (Rp Triliun)	4,18	4,56	5,25	5,63	5,88	6,30	6,77
Pertumbuhan (yoy)%	52,56	53,45	59,27	55,26	40,41	38,20	28,91
Konsumsi (Rp Triliun)	14,72	24,92	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32
Pertumbuhan (yoy)%	13,25	12,1	11,33	9,77	7,87	9,60	11,15

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Total Kredit (Rp Triliun)	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11
Pertumbuhan (yoy) %	2,49	2,65	5,91	1,25	0,57	1,61	2,46
Modal Kerja (Rp Triliun)	12,07	12,62	12,47	12,15	11,42	11,77	11,82
Pertumbuhan (yoy)%	-13,98	-7,61	1,84	-5,79	-5,42	-6,78	-5,22
Investasi (Rp Triliun)	9,75	9,62	10,15	9,82	8,77	8,91	9,23
Pertumbuhan (yoy)%	8,80	2,30	5,79	-4,13	-10,16	-7,43	-9,15
Konsumsi (Rp Triliun)	26,55	16,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06
Pertumbuhan (yoy)%	9,69	8,49	7,93	6,83	7,03	8,83	10,29

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian	1,74	1,92	2,20	2,32	2,33	3,01	3,28
Perikanan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,31	0,31
Pertambangan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,13
Ind, Pengolahan	1,06	1,16	1,24	1,30	1,31	1,34	1,34
Listrik, Gas & Air	0,06	0,07	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	0,51	0,58	0,62	0,62	0,54	0,57	0,54
Perdagangan	5,26	5,29	5,47	5,59	5,52	5,77	6,04
Hotel & Restoran	0,31	0,35	0,41	0,44	0,47	0,51	0,53
Transportasi, Gudang & Kom,	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27	0,28	0,31
Perantara Keuangan	0,14	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	0,20	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,27
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,23	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31	0,35
Jasa Kemasyarakatan	0,54	0,61	0,71	0,77	0,77	0,81	0,82
Jasa Perseorangan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	24,72	24,93	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32
Total	35,42	36,10	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian	2,97	3,79	4,05	4,12	4,15	4,58	4,56
Perikanan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,31
Pertambangan	3,59	2,47	2,27	2,42	1,48	1,16	1,35
Ind, Pengolahan	3,43	4,13	3,97	3,86	4,30	4,43	4,22
Listrik, Gas & Air	0,33	0,27	0,33	0,33	0,32	0,31	0,32
Konstruksi	0,78	0,82	0,93	0,92	0,89	0,86	0,94
Perdagangan	6,67	6,66	6,85	6,34	6,27	6,48	6,72
Hotel & Restoran	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,63
Transportasi, Gudang & Kom,	0,30	0,30	0,36	0,38	0,38	0,38	0,36
Perantara Keuangan	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	2,10	2,01	1,92	1,52	0,26	0,27	0,29
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,25	0,26	0,29	0,32	0,32	0,33	0,36
Jasa Kemasyarakatan	0,56	0,62	0,73	0,78	0,78	0,82	0,84
Jasa Perseorangan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	26,55	26,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06
Total	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah

Ekonomi Aceh pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,54% (yoy).

Ekonomi Aceh pada triwulan III 2024 tumbuh 5,17% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera (4,48% yoy) maupun Nasional (4,95% yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Provinsi Aceh. Hal ini tercermin dari meningkatnya kinerja berbagai Lapangan Usaha (LU) terkait yaitu LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan III 2024 tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan III 2024 kembali menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Daerah yang membaik adalah Belanja Operasi dan Belanja Transfer yang memiliki pertumbuhan masing-masing sebesar 28,96% dan 17,26%. Sedangkan, Pendapatan Daerah tumbuh membaik di semua komponen dengan komponen pertumbuhan tertinggi pada komponen Pendapatan Transfer yang tumbuh sebesar 9,10%.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Gabungan Kota di Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,09% (yoy).

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 3,09% (yoy). Melandainya tekanan inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024, terutama bersumber dari deflasi komoditas makanan cabai merah dan penerapan diskon tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diterapkan pasca kenaikan tarif pada Juni 2024. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan cukai rokok dan tembakau, tarif air PDAM setelah diskon harga, serta berlanjutnya peningkatan harga emas perhiasan.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 tetap terjaga, hal ini tercermin dari rendahnya Non Performing Financing (NPF). Sementara itu, kinerja pembiayaan tercatat tumbuh 13,35% (yoy). Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 12,11% (yoy). Di sisi lain, rasio pembiayaan untuk UMKM tercatat sebesar 28,27%.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan III 2024, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh.

Pada triwulan III 2024, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi net inflow pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yang diikuti oleh tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh masih berada pada urutan ketiga, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2024 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya.

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,37%-5,17% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Sementara itu, laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Prospek terkendalinya inflasi Provinsi Aceh pada tahun 2024 didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID se-Aceh.



BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Ekonomi Aceh pada triwulan III 2024 tumbuh 5,17% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera (4,48% yoy) maupun Nasional (4,95% yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Provinsi Aceh. Hal ini tercermin dari meningkatnya kinerja berbagai Lapangan Usaha (LU) terkait yaitu LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

1.1. Gambaran umum

Ekonomi Aceh pada triwulan III 2024 tumbuh 5,17% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera (4,48% yoy) maupun Nasional (4,95% yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Provinsi Aceh. Hal ini tercermin dari meningkatnya kinerja berbagai Lapangan Usaha (LU) terkait yaitu LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh bersumber dari peningkatan kinerja Ekspor Barang dan Jasa, serta masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) terkait penyelenggaraan PON yaitu LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

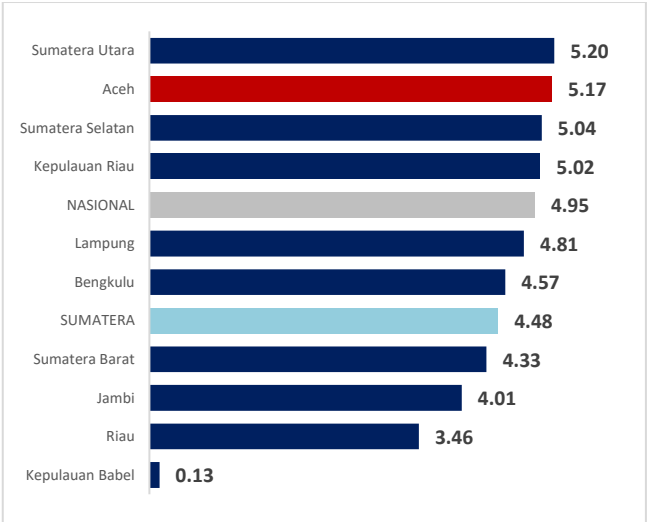
Kinerja Perekonomian Triwulan III 2024

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2024 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy). Sementara itu, ekonomi Sumatera pada triwulan III 2024 tumbuh stabil sebesar 4,48% (yoy), sama dengan triwulan sebelumnya (Grafik 1.1).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 juga lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 5,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,54% (yoy) (Grafik 1.2). Kinerja ekonomi Aceh tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2024

ini menempatkan Aceh menjadi provinsi dengan pertumbuhan kedua tertinggi di wilayah Sumatera.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera
Triwulan III 2024 (% yoy)

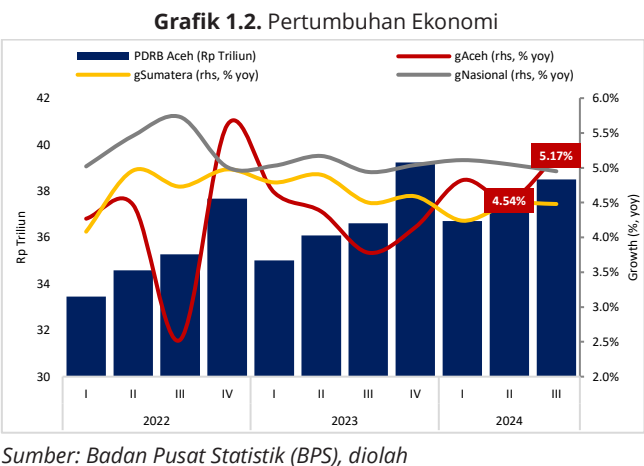


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh bersumber dari peningkatan kinerja Ekspor Barang dan Jasa, serta masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Peningkatan kinerja Ekspor Barang dan Jasa didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor komoditas utama yaitu batubara dan kopi pada triwulan laporan. Tetap kuatnya Konsumsi RT ditopang oleh masih kuatnya daya beli masyarakat di tengah penyelenggaraan PON XXI di provinsi Aceh dan inflasi yang lebih stabil. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh kuat didorong oleh akselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan PON XXI di Aceh pada triwulan laporan. Di sisi lain, tetap kuatnya PMTB didorong oleh percepatan pembangunan PSN Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh, serta infrastruktur PON XXI di Aceh.

Sementara dari sisi Lapangan Usaha, akselerasi didorong oleh meningkatnya kinerja LU Pertanian, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Peningkatan kinerja LU Pertanian didorong oleh peningkatan produksi padi serta tercermin dalam peningkatan

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan. Sementara itu, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 pada triwulan laporan. Selain itu, inflasi yang lebih stabil juga turut mendorong kinerja sektor tersebut. Di sisi lain, LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan yang tercermin dari peningkatan penggunaan listrik industri pada triwulan laporan.

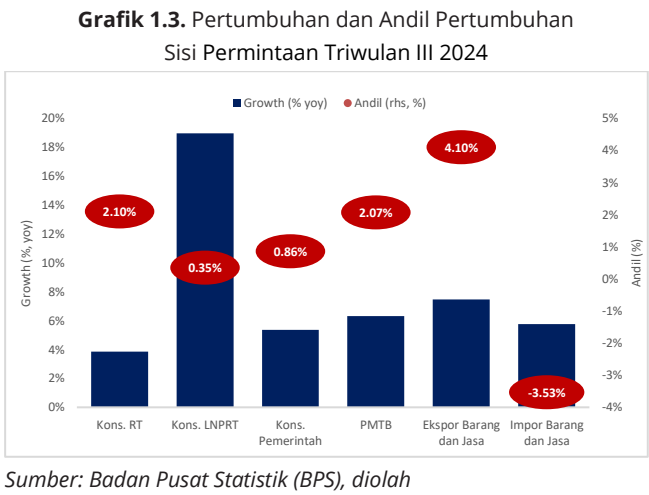


Berdasarkan pencapaian tersebut, kontribusi Aceh terhadap ekonomi Sumatera sebesar 4,91%, relatif stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan perekonomian terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,08%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,18%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,54%), Riau (22,94%), dan Sumatera Selatan (13,82%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut mencapai 60,30% dari total ekonomi Sumatera.

1.2. Sisi Permintaan

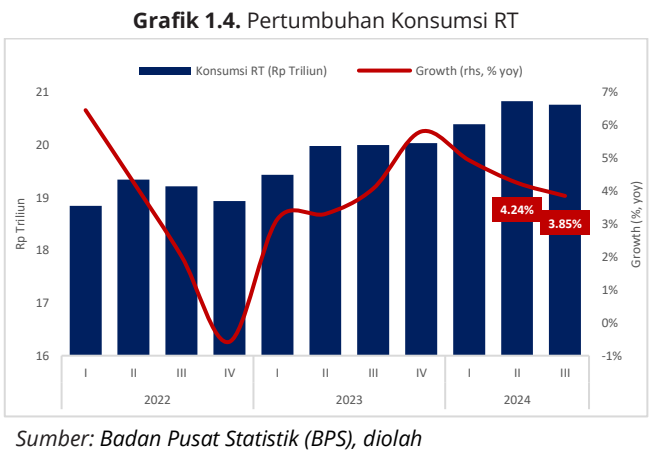
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh bersumber dari peningkatan kinerja Ekspor Barang dan Jasa, serta masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Ekspor Barang dan Jasa menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi pada sisi

permintaan pada triwulan III 2024. Ekspor Barang dan Jasa memberikan andil pertumbuhan sebesar 4,10%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga memberikan andil pertumbuhan yang tinggi sebesar 2,10% di tengah penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Sementara itu, PMTB turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 2,07% didorong oleh pembangunan PSN dan infrastruktur PON 2024 (Grafik 1.3).



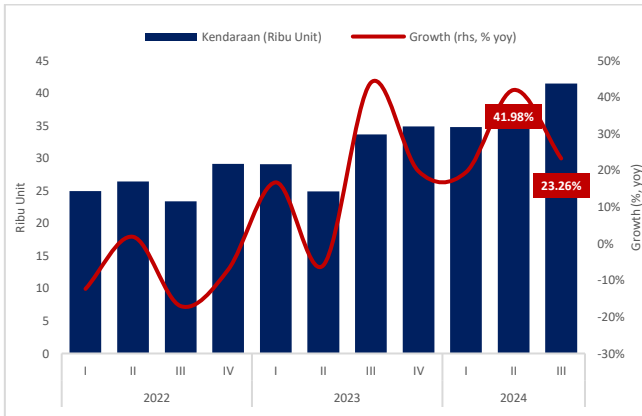
Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan III 2024, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat. Konsumsi rumah tangga pada periode laporan tumbuh sebesar 3,85% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,24% (yoy) (Grafik 1.4). Tingkat pertumbuhan ini membuat konsumsi rumah tangga memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,10%. Walaupun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap kuat didukung oleh inflasi yang terjaga di tengah penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.



Lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercermin dari menurunnya penjualan kendaraan (mobil dan motor) di Provinsi Aceh. Pada triwulan III 2024, penjualan kendaraan mencapai 41.498 unit kendaraan atau tumbuh sebesar 23,26% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 41,98% (yoy) (Grafik 1.5).

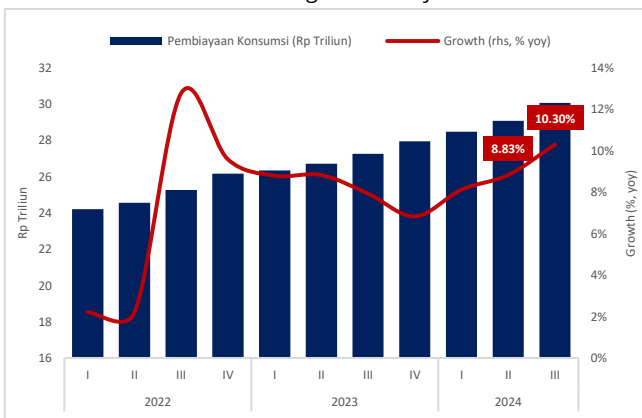
Grafik 1.5. Perkembangan Penjualan Kendaraan



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), diolah

Masih kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditopang oleh menguatnya pembiayaan konsumsi. Walaupun mengalami deselerasi, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat didukung oleh peningkatan pembiayaan konsumsi yang tumbuh sebesar 10,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,83% (% yoy) (Grafik 1.6).

Grafik 1.6. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi



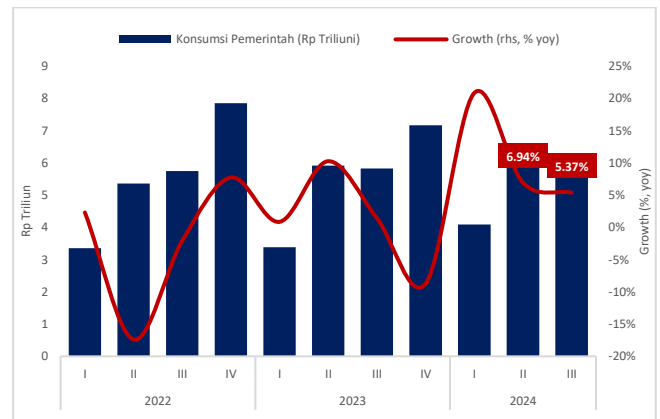
Sumber : Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah masih tumbuh kuat di tengah penyelenggaraan PON XXI di Aceh, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, konsumsi pemerintah tetap tumbuh tinggi sebesar

5,37% (yoy), hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2024 sebesar 6,94% (yoy) (Grafik 1.7). Hal ini sejalan normalisasi belanja pemerintah pada triwulan laporan pasca optimalisasi belanja dalam rangka persiapan penyelenggaraan PON pada triwulan II 2024 sehingga pertumbuhan pada triwulan tersebut cukup signifikan. Pada penyelenggaraan PON di triwulan III 2024, aktivitas ekonomi lebih didorong oleh belanja atlet dan pendukung sehingga penyelenggaraan PON lebih berdampak pada konsumsi rumah tangga yang tetap kuat.

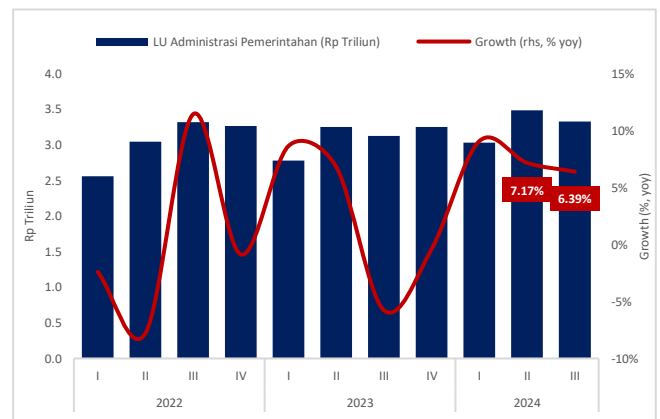
Grafik 1.7. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lebih rendahnya pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tercermin juga dari melambatnya LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pada triwulan III 2024, LU tersebut tumbuh sebesar 6,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,17% (yoy) (Grafik 1.8).

Grafik 1.8. Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

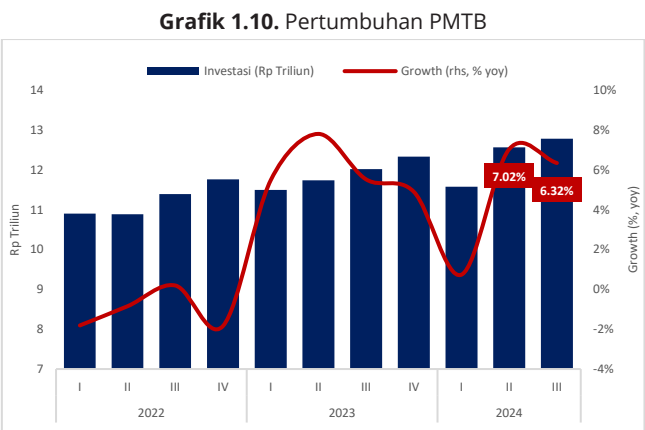
Masih kuatnya konsumsi pemerintah sejalan dengan meningkatnya realisasi APBD pada triwulan laporan. Pada triwulan III 2024, realiasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Aceh mengalami peningkatan, dengan akumulasi tercatat mencapai Rp26,40 triliun atau 64,95% dari total anggaran Rp40,65 triliun pada tahun 2024 (Grafik 1.9).



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb), diolah

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pada triwulan III 2024, PMTB di Aceh tetap kuat di tengah penyelesaian berbagai proyek infrastruktur. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Aceh pada triwulan III 2024 tumbuh kuat sebesar 6,32% (yoy) meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,02% (yoy) (Grafik 1.10). Pertumbuhan PMTB mengalami normalisasi pasca optimalisasi penyelesaian infrastruktur PON pada triwulan III 2024. Walaupun tumbuh lebih rendah, realisasi pertumbuhan PMTB tetap kuat didukung oleh penyelesaian pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Aceh pada triwulan laporan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

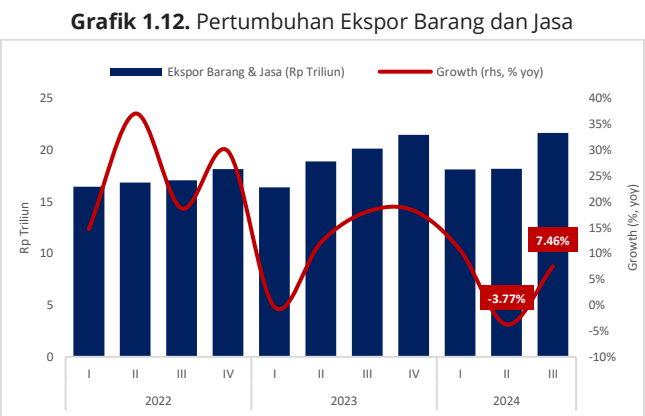
Pembiayaan investasi pada triwulan laporan masih tumbuh terbatas. Pembiayaan investasi secara nilai mengalami peningkatan dari Rp8,91 triliun pada triwulan II 2024 menjadi Rp9,23 triliun pada triwulan III 2024. Namun demikian, realisasi tersebut masih tumbuh negatif dan lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan investasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar -9,15% (yoy) seiring dengan masih tingginya wait and see sektor swasta menjelang Pilkada (Grafik 1.11).



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Ekspor Barang dan Jasa

Membangkanya harga komoditas mendorong kinerja ekspor barang dan jasa tumbuh meningkat pada triwulan III 2024. Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 7,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -3,77% (yoy) (Grafik 1.12). Perbaikan kinerja ekspor barang dan jasa didukung oleh peningkatan ekspor komoditas utama seperti batubara dan kopi seiring dengan membangkanya harga kedua komoditas tersebut.

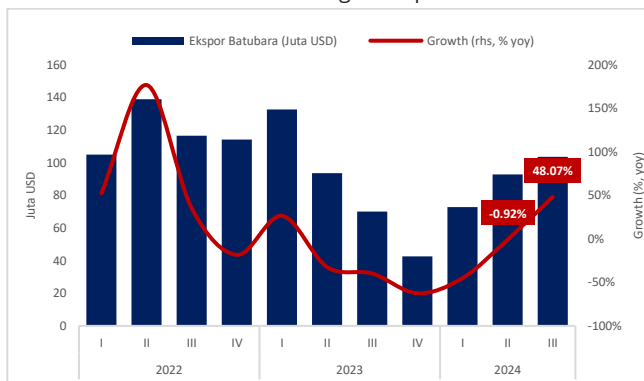


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Ekspor batubara menjadi pendorong utama meningkatnya kinerja ekspor barang dan jasa.

Pada triwulan III 2024, ekspor barang dan jasa Aceh utamanya ditopang oleh ekspor batubara dengan pangsa sebesar 61,50%. Ekspor batubara pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 48,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,92% (yoy) (Grafik 1.13). Pemulihan ekspor batubara sejalan dengan kenaikan harga batubara yang mengalami kenaikan dari USD 76,94/metric ton pada triwulan II 2024 menjadi USD 77,01/metric ton pada triwulan III 2024. Selain itu, peningkatan ekspor batubara juga didorong oleh peningkatan permintaan batubara dari India sebagai importir utama batubara dari Aceh.

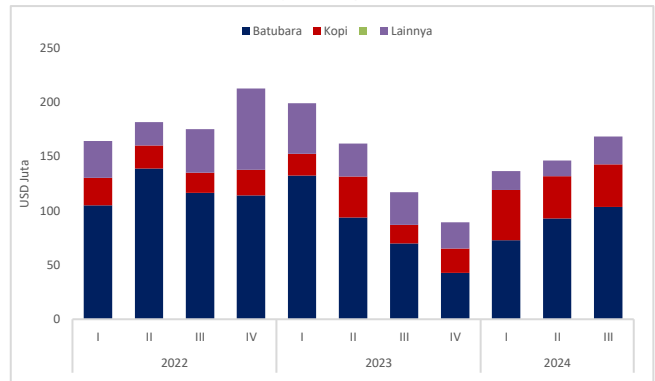
Grafik 1.13. Perkembangan Ekspor Batubara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Ekspor komoditas utama lainnya yaitu kopi masih menunjukkan peningkatan. Komoditas ekspor luar negeri Aceh terbesar kedua setelah Batubara adalah kopi dengan pangsa 23,29% (Grafik 1.14). Pada triwulan III 2024, ekspor kopi Aceh mencapai USD39,21 juta, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD38,93 juta. Sementara itu, ekspor lainnya (pangsa 15,21%) umumnya terdiri komoditas rempah-rempah, minyak nabati, pupuk, produk kimia, dan ikan olahan. Pada periode laporan, ekspor lainnya memberikan nilai ekspor sebesar USD25,61 juta, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar USD14,41 juta.

Grafik 1.14. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh

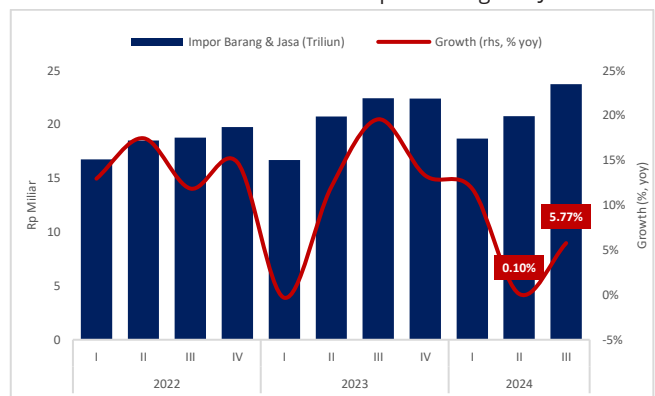


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Impor Barang dan Jasa

Impor barang dan jasa mengalami akselerasi sejalan dengan kenaikan impor gas pada triwulan laporan. Pada triwulan III 2024, impor barang dan jasa tumbuh sebesar 5,77% (yoy), lebih tinggi triwulan sebelumnya sebesar 0,10% (yoy) (Grafik 1.15). Secara umum, kinerja impor barang dan jasa didominasi oleh impor komoditas migas terutama gas dan aspal dengan pangsa mencapai 89,49% dari total impor sepanjang tahun 2024.

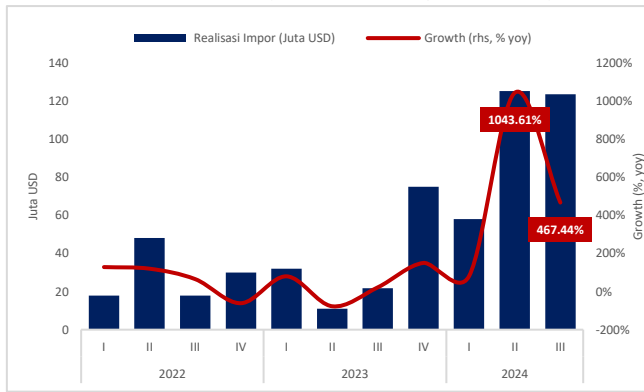
Grafik 1.15. Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Impor Aceh pada triwulan III 2024 tetap tinggi didorong oleh impor migas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, nilai impor barang Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 sebesar USD125,65 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar USD125,34 juta. Sementara itu, dari sisi pertumbuhan impor mengalami deselerasi walaupun tetap tumbuh tinggi dengan tumbuh sebesar 467,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1.043,61% (yoy) (Grafik 1.16).

Grafik 1.16. Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri

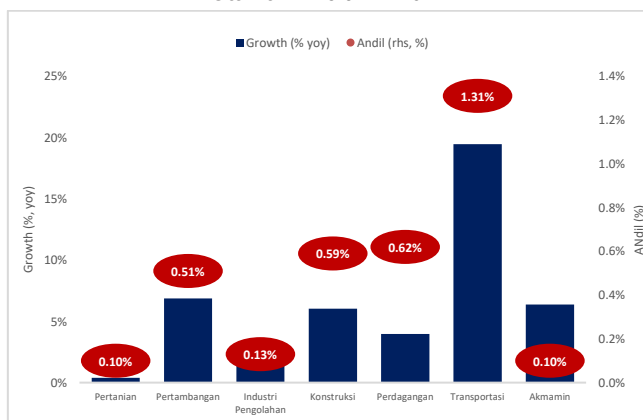


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi penawaran, pertumbuhan utamanya didorong oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha, (LU) Pertanian, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Akomodasi Makanan dan Minuman. LU Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar pada triwulan laporan sebesar 1,31%, LU Perdagangan sebesar 0,62%, serta disusul oleh LU Kontruksi sebesar 0,59% (Grafik 1.17). Sementara itu, LU Pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,10% pada triwulan laporan. Walaupun demikian LU Pertanian masih memiliki pangsa terbesar bagi PDRB Aceh sebesar 29,74%, disusul LU Perdagangan sebesar 14,94%, LU Kontruksi sebesar 9,07%, LU Administrasi Pemerintahan sebesar 9,04%, serta LU Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,11%.

Grafik 1.17. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan III 2024



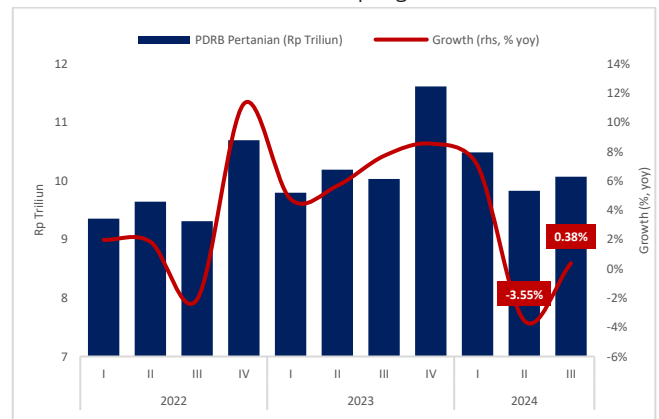
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja LU Pertanian mengalami peningkatan sejalan dengan pergeseran musim panen padi.

Pada triwulan III 2024, LU Pertanian tumbuh sebesar 0,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -3,55% (yoy) (Grafik 1.18). Meningkatnya kinerja LU Pertanian pada triwulan laporan sejalan dengan pergeseran musim panen padi yang menyebabkan musim panen gadu dimulai lebih awal. Meningkatnya kinerja sektor ini juga tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan.

Grafik 1.18. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian

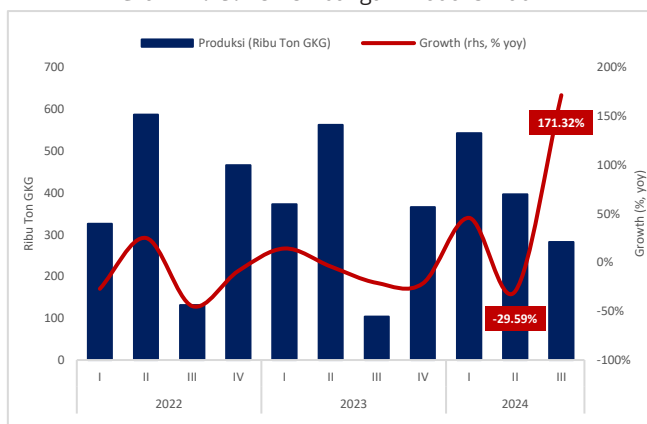


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pertumbuhan produksi padi mengalami peningkatan pada triwulan III 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan, produksi padi di Provinsi Aceh mencapai 281,90 ribu ton GKG, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 396,03 ribu ton GKG. Walaupun demikian, dari sisi pertumbuhan produksi padi mengalami peningkatan 171,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -29,59% (yoy) (Grafik 1.19). Pada tahun 2024, diperkirakan luas panen padi mengalami peningkatan menjadi 301,08 ribu hektar atau naik sebesar 18,40% (yoy) dari tahun 2023 yang sebesar 254,29 ribu hektar.

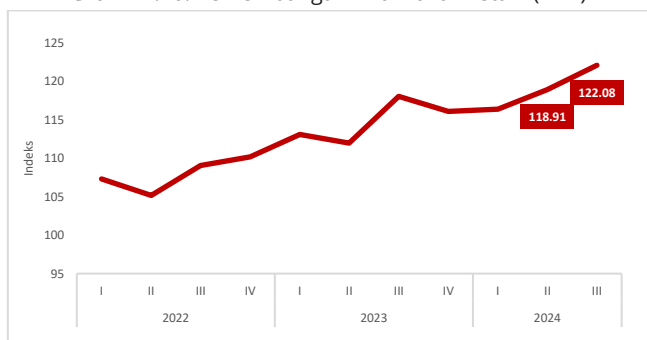
Grafik 1.19. Perkembangan Produksi Padi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja LU Pertanian juga tercermin dari peningkatan NTP pada triwulan laporan. NTP pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan menjadi 122,08, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 118,91 (Grafik 1.20). Peningkatan nilai NTP ini didorong dari peningkatan Indeks yang Diterima Petani (It) sebesar 142,75 pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 139,31. Selain itu, peningkatan nilai NTP juga didorong oleh penurunan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 116,34 pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 117,16.

Grafik 1.20. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



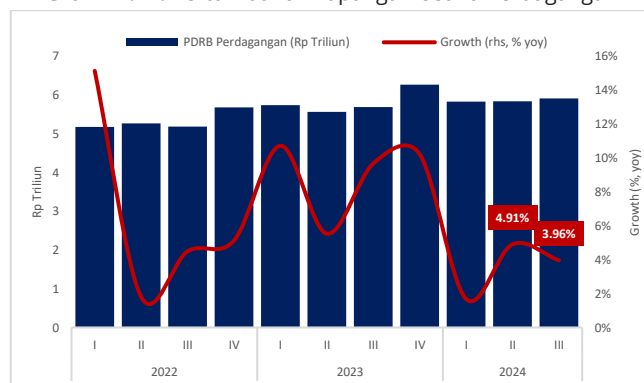
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan III 2024 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, LU Perdagangan mengalami deselerasi dengan tumbuh sebesar 3,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,91% (yoy) (Grafik 1.21). Penurunan kinerja

LU Perdagangan didorong oleh penurunan penjualan kendaraan dan juga tercermin dalam penurunan nilai Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada triwulan laporan. Walaupun demikian, LU Perdagangan tetap tumbuh kuat yang didukung oleh meningkatnya pembiayaan Sektor Perdagangan serta tingkat inflasi yang lebih stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 1.21. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lebih rendahnya kinerja LU Perdagangan didorong oleh melemahnya penjualan kendaraan pada triwulan laporan. Berdasarkan Grafik 1.5, Pada triwulan III 2024, penjualan kendaraan mencapai 41.498 unit kendaraan atau tumbuh sebesar 23,26% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 41,98% (yoy) (Grafik 1.5).

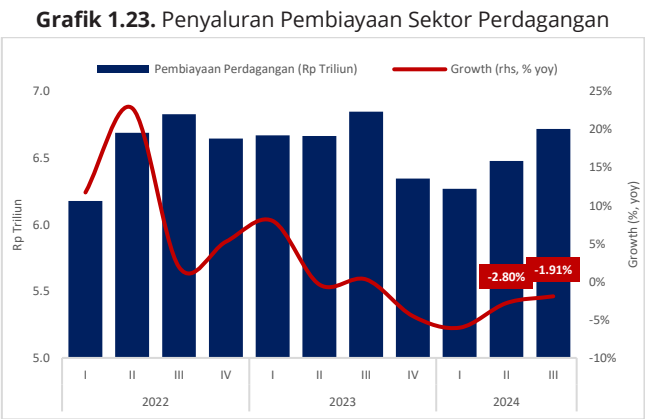
Kinerja LU Perdagangan yang menurun juga tercermin dari menurunnya nilai Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Deselerasi kinerja LU Perdagangan juga tercermin dari menurunnya nilai SKDU menjadi -1,41% Saldo Bersih Tertimbang (SBT), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,19% (Grafik 1.22).

Grafik 1.22. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

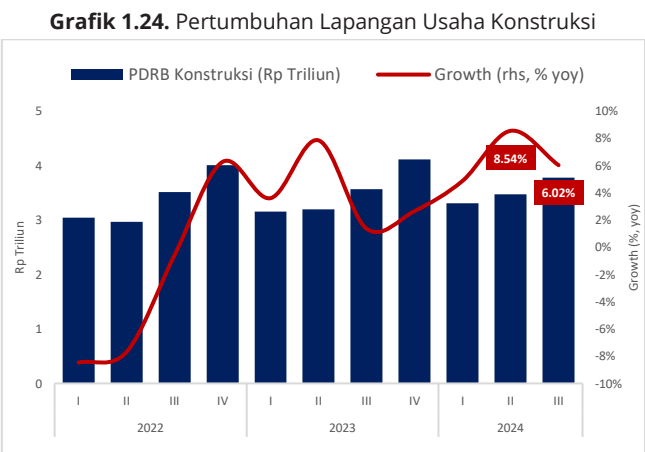
LU Perdagangan tetap tumbuh kuat ditopang oleh meningkatnya pembiayaan pada sektor tersebut. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp6,72 triliun atau tumbuh sebesar -1,91% (yoy). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -2,80% (yoy) dengan pembiayaan mencapai Rp6,48 triliun (Grafik 1.23).



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

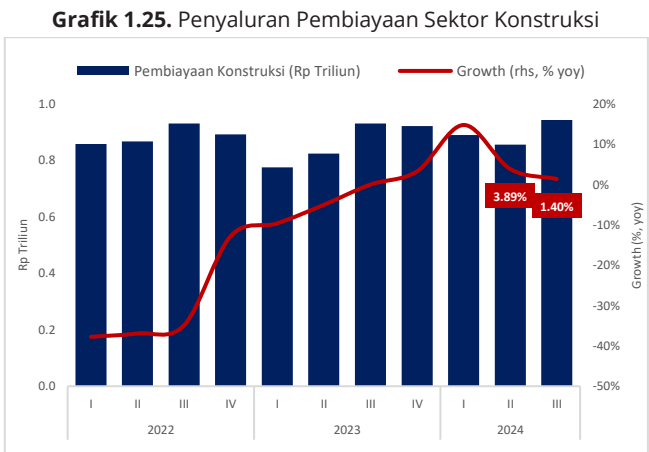
Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan III 2024 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, LU Konstruksi tumbuh melambat yaitu tumbuh sebesar 6,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,54% (yoy) (Grafik 1.24). Melambatnya kinerja LU Konstruksi sejalan dengan melambatnya pembiayaan Sektor Konstruksi. Walaupun demikian, kinerja LU Konstruksi tetap tumbuh kuat didukung oleh penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur PON XXI di Aceh pada triwulan laporan.



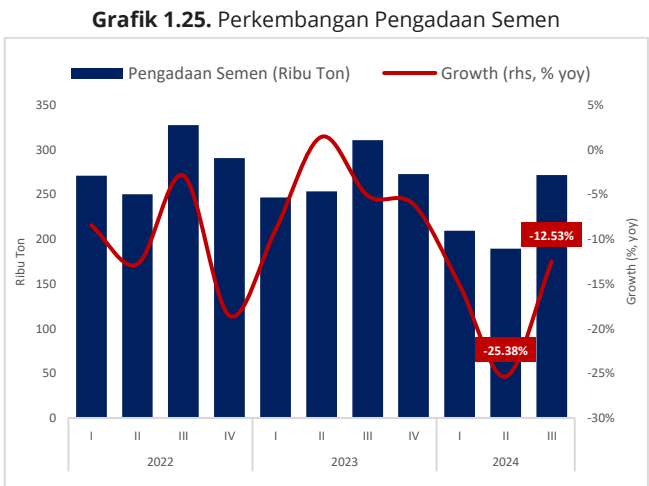
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pelambatan kinerja LU Konstruksi tercermin dari melambatnya pembiayaan Sektor Konstruksi. Pada triwulan laporan, nilai pembiayaan Sektor Konstruksi di Aceh mencapai Rp0,94 triliun atau tumbuh sebesar 1,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,89% (yoy) dengan nilai pembiayaan mencapai Rp0,86 triliun (Grafik 1.25).



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Melambatnya kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari masih menurunnya pengadaan semen. Kinerja pengadaan semen pada triwulan laporan masih tumbuh negatif, meskipun lebih baik dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, pengadaan semen tumbuh sebesar -12,53% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -25,38% (yoy) (Grafik 1.25).

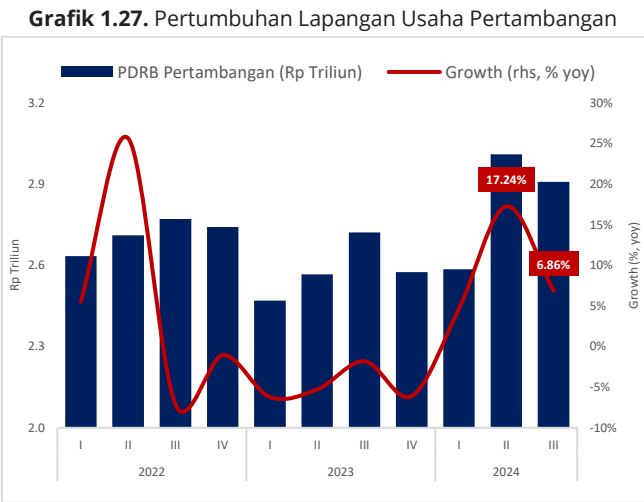


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Lapangan Usaha Pertambangan

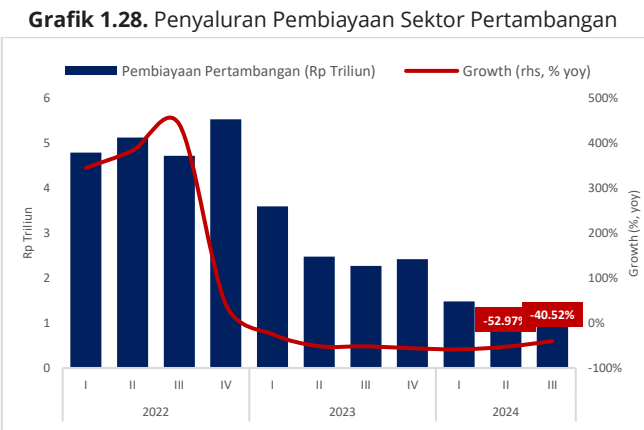
Kinerja LU Pertambangan pada triwulan III 2024 masih tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada

triwulan III 2024, LU Pertambangan tumbuh sebesar 6,86% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,24% (yoy) (Grafik 1.27). Masih positifnya pertumbuhan LU Pertambangan sejalan dengan membaiknya kinerja ekspor batubara.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pertumbuhan pembiayaan LU Pertambangan semakin membaik namun masih tumbuh negatif. Hal ini tercermin dari perkembangan sisi pembiayaan sektor ini yang menunjukkan perbaikan. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp1,35 triliun masih mengalami penurunan sebesar -40,52% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -52,97% (yoy) (Grafik 1.28).

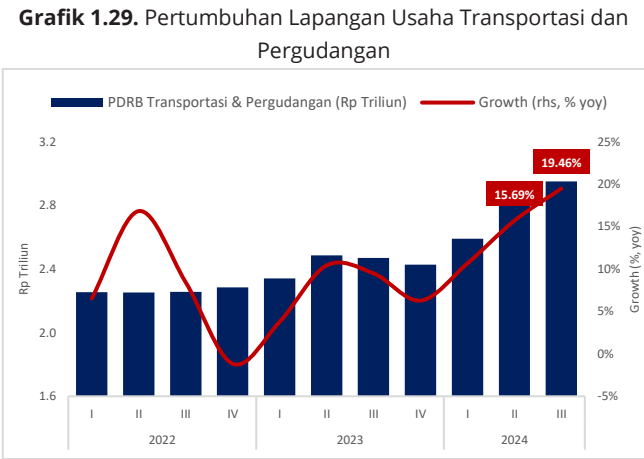


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

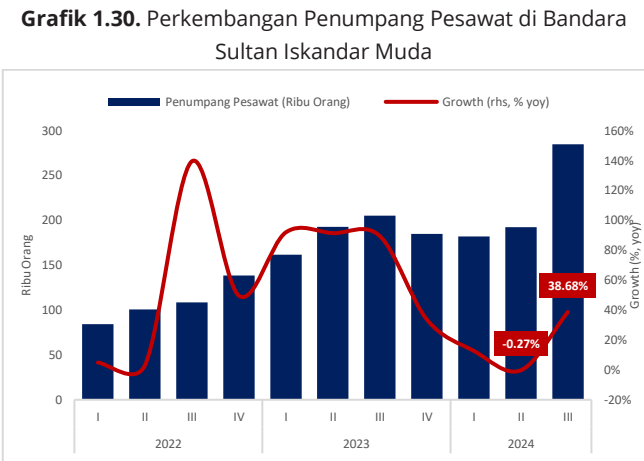
Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan III 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, LU

Transportasi dan Pergudangan mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 19,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,69% (yoy) (Grafik 1.29). Meningkatnya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan peningkatan mobilitas di tengah penyelenggaraan PON XXI di Aceh.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Penyelenggaraan PON XXI di Aceh mendorong peningkatan jumlah penumpang pesawat selama triwulan laporan. Pada triwulan III 2024, jumlah penumpang pesawat (berangkat dan datang) di Bandara Sultan Iskandar Muda mencapai 284,50 ribu orang atau tumbuh sebesar 38,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,27% (yoy) (Grafik 1.30).



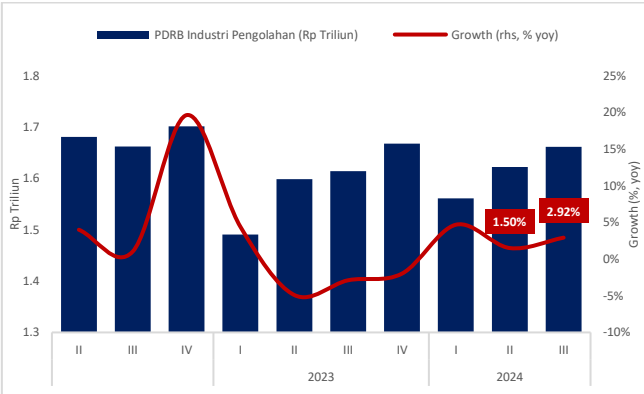
Sumber: Angkasa Pura II, diolah

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, LU Industri

Pengolahan mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 2,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,50% (yoy) (Grafik 1.31). Meningkatnya kinerja LU Industri Pengolahan sejalan dengan meningkatnya kinerja penggunaan listrik industri dan membaiknya nilai SKDU sektor tersebut.

Grafik 1.31. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Membaiknya kinerja LU Industri tercermin dari membaiknya penggunaan listrik industri pada triwulan laporan. Pada triwulan III 2024, penggunaan listrik industri mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar -1,44% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -2,41% (yoy) (Grafik 1.32). Membaiknya penggunaan listrik untuk industri ini mengkonfirmasi adanya peningkatan aktivitas industri pengolahan pada triwulan laporan.

Grafik 1.32. Perkembangan Penggunaan Listrik Industri

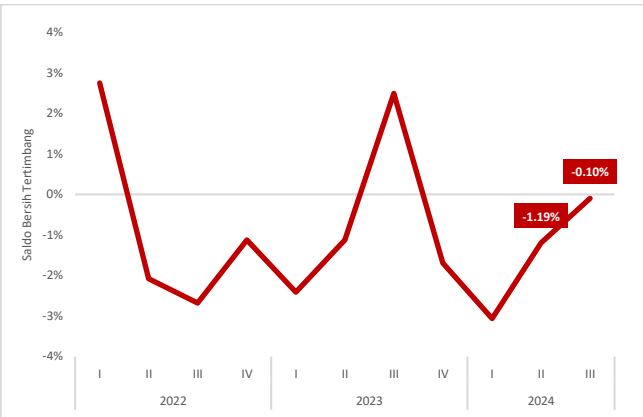


Sumber: Perusahaan Listrik Negara (PLN), diolah

Kinerja LU Industri Pengolahan yang membaik juga tercermin dari menurunnya nilai Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan juga tercermin dari

menurunnya nilai SKDU menjadi -0,10% Saldo Bersih Tertimbang (SBT), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -1,19% (Grafik 1.33).

Grafik 1.33. Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan

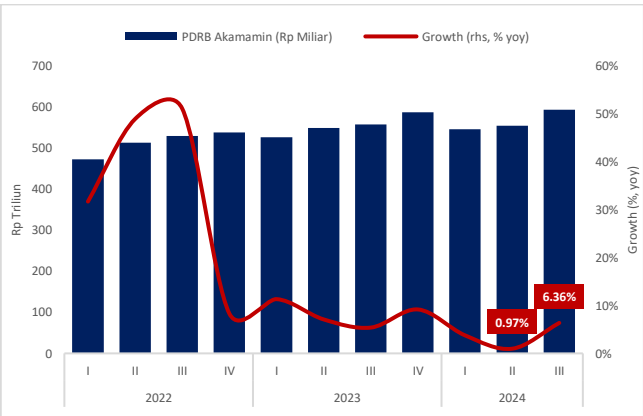


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan III 2024 mengalami akselerasi. Pada triwulan III 2024, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan perbaikan dengan tumbuh sebesar 6,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,97% (yoy) (Grafik 1.24). Meningkatnya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan meningkatnya kunjungan selama penyelenggaraan PON XXI di provinsi Aceh.

Grafik 1.34. Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomamin

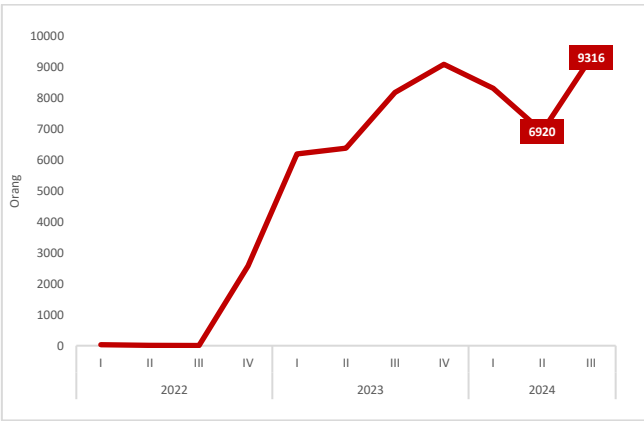


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan laporan. Pada triwulan III 2024, di tengah penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera 2024 jumlah wisatawan mancanegara meningkat menjadi 9.316 orang, lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar - 6.920 orang (Grafik 1.35).

Grafik 1.35. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara

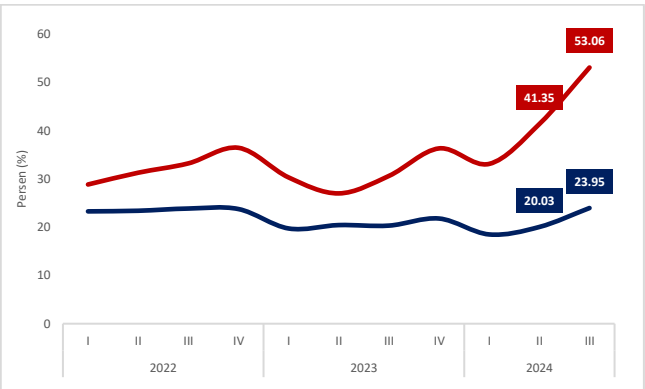


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tingkat Penghunian Kamar juga mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Pada triwulan III 2024, Tingkat Penghunian Kamar untuk Hotel Berbintang meningkat menjadi 53,06%, lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 41,35%. Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar untuk Akomodasi Lainnya juga menunjukkan peningkatan menjadi 23,95%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,03% (Grafik 1.36).

Grafik 1.36. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

EVENT OLAHRAGA SEBAGAI AKSELERATOR PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH: “DAMPAK PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XXI DI PROVINSI ACEH 2024”

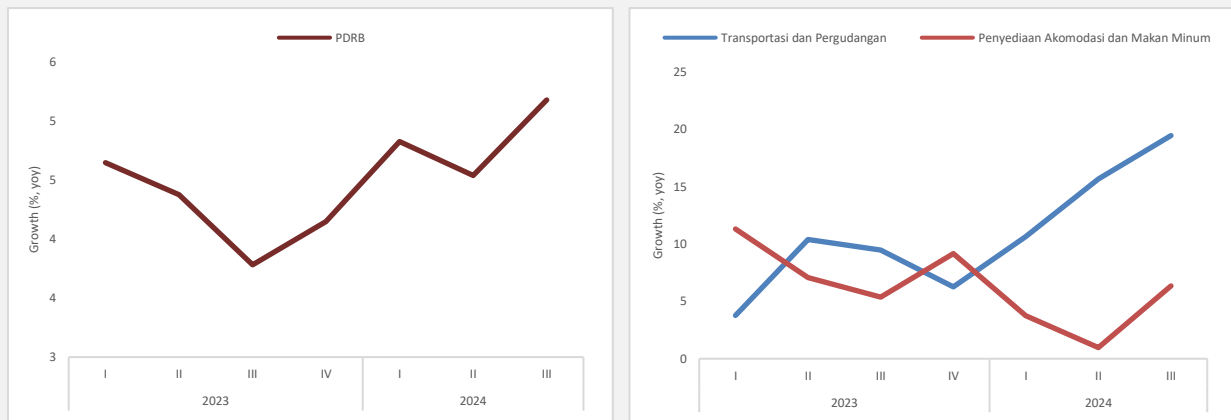
Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah pesta olahraga terbesar di Indonesia yang melibatkan atlet-atlet terbaik dari seluruh provinsi. Pada PON XXI tahun 2024, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara berbagi peran dalam menjadi tuan rumah penyelenggaraan event tersebut. Provinsi Aceh sendiri berperan sebagai tuan rumah *Opening Ceremony* dan penyelenggaraan 33 cabang olahraga, sementara Provinsi Sumatera Utara merupakan tuan rumah untuk *Closing Ceremony* dan penyelenggaraan 34 cabang olahraga lainnya. Event tersebut telah berlangsung pada 8-20 September 2024, dengan beberapa pertandingan diselenggarakan lebih awal agar seluruh cabang lomba dapat diselesaikan tepat waktu. Bagi Provinsi Aceh, penyelenggaraan PON XXI kali ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kali pertama provinsi ini menjadi tuan rumah PON.

Berbagai studi literatur, menunjukkan adanya bukti penyelenggaraan event olahraga seperti PON di suatu daerah, dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah tersebut. Elmer Sterken (2013) dalam “*Growth Impact Of Major Sporting Events*” menemukan bahwa penyelenggaraan *Olympic Games* pada tahun 1964-1998 memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun penyelenggaraan. Sementara itu, Agus Ariutama dkk. (2021) dalam “*The Impact of Asian Games 2018 on Indonesian Economy*” menemukan bahwa penyelenggaraan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten memiliki *multiplier effect* sebesar lebih dari Rp8,4 triliun. Terkait dengan penyelenggaraan PON, Perhimpunan Simatupang (2024) menemukan bahwa penyelenggaraan PON 2021 di Papua berpotensi mampu meningkatkan PDRB hingga 1,1%.

Sebagai sebuah pesta olahraga terbesar di level nasional yang diselenggarakan tiap empat tahun sekali, penyelenggaraan PON tentunya berdampak pada perekonomian khususnya bagi perekonomian tuan rumah penyelenggara *event* tersebut. Dampak ekonomi ini berasal baik dari pembangunan atau revitalisasi sarana dan prasarana olahraga untuk penyelenggaraan PON, pembangunan atau perbaikan fasilitas/infrastruktur penunjang, peningkatan mobilitas, hingga potensi pariwisata, penjualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, serta penyewaan akomodasi/hotel dari datangnya ribuan atlet, *official*, maupun penonton selama penyelenggaraan *event* tersebut. Dalam penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, total pagu anggaran yang dikelontorkan mencapai Rp 802,28 Miliar dengan rincian pengerjaan konstruksi dengan total anggaran mencapai Rp783,50 Miliar dan pengerjaan non-konstruksi dengan total anggaran mencapai Rp18,78 Miliar. Sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari APBN, APBA (Provinsi), APBK, dan DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh). Berdasarkan hasil analisis Tabel Input-Output, diperkirakan dampak penyelenggaraan PON di Aceh berpotensi akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,63%. Pada analisis tersebut, diasumsikan berbagai faktor input penyelenggaraan PON berasal dari Aceh. Sehingga, apabila faktor input berasal dari daerah lain maka dampak ekonomi akan lebih kecil dari perkiraan tersebut.

Pada triwulan III 2024, dampak penyelenggaraan PON XXI di Provinsi Aceh nampaknya terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi ini. Pada triwulan tersebut, perekonomian Aceh tumbuh sebesar 5,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,54% (yoy). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan beberapa lapangan usaha (LU) diantaranya LU Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 19,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,69% (yoy). Selain itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 6,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya sebesar 0,97% (yoy). Selain kedua lapangan usaha utama di atas, penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 juga turut mendorong lapangan usaha pendukung kegiatan seperti LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Keuangan dan Asuransi, LU Jasa Perusahaan, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta LU Jasa lainnya.



Grafik Pertumbuhan PDRB, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Provinsi Aceh

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 memang terbukti memiliki dampak ekonomi di Provinsi Aceh. Walaupun demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan diharapkan terus berlanjut walaupun penyelenggaraan *event* telah selesai dilaksanakan. Pemanfaatan berbagai *venue* olahraga yang sudah dibangun serta penyelenggaraan berbagai *event* olahraga maupun seni kedepannya diharapkan mampu kembali mendongkrak perekonomian Aceh.

--000--



BAB II

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan III 2024 kembali menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Daerah yang membaik adalah Belanja Operasi dan Belanja Transfer yang memiliki pertumbuhan masing-masing sebesar 28,96% dan 17,26%. Sedangkan, Pendapatan Daerah tumbuh membaik di semua komponen dengan komponen pertumbuhan tertinggi pada komponen Pendapatan Transfer yang tumbuh sebesar 9,10%.

2.1. Gambaran umum

Realisasi agregat belanja pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan III 2024 **membaik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya**. Secara nominal, agregat Belanja Pemerintah (APBN + APBD) mencapai Rp63,90 triliun atau 69,90% dari pagu agregat belanja tahun 2024, meningkat dari triwulan III 2023 yang hanya 62,39%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh realisasi APBN yang semakin baik dari 68,66% di triwulan III 2023, menjadi 73,87% di triwulan III 2024 atau meningkat sebesar Rp4,49 triliun. Peningkatan juga didukung oleh realisasi APBD yang semakin baik dari 54,73% di triwulan III 2023, menjadi 64,95% di triwulan III 2024 atau meningkat sebesar Rp4,86 triliun.

Di sisi lain, **realisasi agregat Pendapatan Pemerintahan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya**. Secara nominal, realisasi pendapatan APBN dan APBD pada triwulan III 2024 mencapai Rp30,17 triliun, meningkat dibandingkan realisasi triwulan III 2023 yang sebesar Rp28,04 triliun. Secara persentase, realisasi pendapatan APBN dan APBD mencapai 64,97% lebih tinggi dari periode di tahun sebelumnya yang sebesar 64,02%.

2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

Nilai pagu Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, nilai agregat pagu Belanja Pemerintah Daerah mencapai Rp40,65 triliun, meningkat sebesar 3,28% (yoy). Secara umum, pagu APBD di Provinsi dan juga kabupaten/kota mengalami peningkatan utamanya pada belanja operasi sebesar Rp2,2 triliun.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD Triwulan III 2024

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah hingga triwulan III 2024 mencapai Rp26,40 triliun atau 64,95% dari total pagu belanja. Persentase realisasi Belanja Pemerintah Daerah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja di triwulan III 2023 yang tercatat sebesar 54,73% dari pagu belanja 2023. Hal ini juga lebih tinggi secara nominal dibandingkan triwulan III 2023 yang sebesar Rp21,54 triliun.

Realisasi belanja Pemerintah Daerah di triwulan III 2024 masih ditopang oleh belanja operasi. Pada periode laporan, realisasi belanja operasi mencapai Rp19,16 triliun atau sebesar 67,45% terhadap pagu. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan triwulan III 2023 yang sebesar Rp14,85 triliun atau 56,74% dari total pagu. Selanjutnya, realisasi Belanja Modal justru mengalami penurunan realisasi dengan capaian hanya sebesar Rp1,52 triliun pada triwulan III 2024 atau lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang dapat terealisasi sebesar Rp1,79 triliun. Penurunan juga terjadi apabila dilihat dari persentase realisasi terhadap pagu dari 39,65% di triwulan III 2023 menjadi hanya 38,39%

Realisasi Belanja Tidak Terduga juga mengalami peningkatan pada periode pelaporan. Belanja Tidak Terduga meningkat secara persentase realisasi terhadap pagu dari 3,07% pada triwulan III 2023 menjadi 18,79% pada triwulan III 2024. Hal tersebut disebabkan penurunan pagu di tahun 2024 dari Rp636,91 miliar menjadi hanya Rp117,60. Namun demikian, secara nominal belanja tersebut turun dari Rp37,51 miliar di triwulan III 2023 menjadi Rp22,09 miliar pada periode yang sama di 2024.

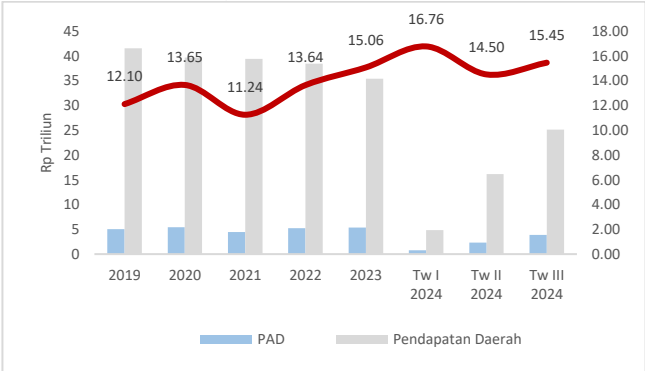
Tabel 2. 2. Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan III 2024

REALISASI BELANJA TRANSFER TRIWULAN III 2024		
	Belanja Bantuan Keuangan	70,23%
	Belanja Bagi Hasil	66,64%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi belanja transfer mengalami peningkatan di triwulan III 2024 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Transfer pada periode laporan mencapai Rp5,7 triliun atau 69,79% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut membuat pertumbuhan belanja transfer sebesar 17,26% (yoy). Komponen Belanja Transfer, yakni Belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan mencapai Rp5,03 triliun atau meningkat sebesar 20,75% (yoy) dibandingkan triwulan III 2023 yang mencapai Rp4,17 triliun. Sementara itu, Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan menjadi sebesar Rp668,42 milyar atau turun -3,72% (yoy) dari triwulan III 2023 yang mencapai Rp694,25 miliar.

Grafik 2. 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Pendapatan Daerah secara nominal dan persentase pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan III 2023. Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan III 2024 sebesar Rp30,18 triliun atau 65,90% dari pagu Pendapatan Daerah 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp28,04 triliun atau 64,02% dari pagu pendapatan 2023. Realisasi tersebut meningkat 1,87 basis poin

dari periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 84,41% dari total realisasi pendapatan. Angka ini meningkat dibanding periode sebelumnya yang hanya sebesar 83,56%. Sementara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp3,88 triliun pada triwulan III 2024 dengan kontribusi sebesar 15,44% dari total realisasi pendapatan APBA/APBD. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Selain itu, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan perbaikan pada periode 2019 s.d 2024 (Grafik 2.1.) meski di triwulan II 2024 mengalami penurunan dan Kembali meningkat pada triwulan III 2024.

Tabel 2. 3. Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan III 2024

REALISASI PENDAPATAN APBD TRIWULAN III 2024	
	Pendapatan Asli Daerah
	Pendapatan Transfer
	Lain-Lain
	64,12%
	64,26%
	9,12%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pada triwulan III 2024, PAD dan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan. PAD tumbuh sebesar 5,25% (yoy) atau meningkat dari Rp3,69 triliun di triwulan III 2023 menjadi Rp3,88 triliun di triwulan III 2024. Kemudian, Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar 9,10% dari Rp19,43 triliun di triwulan III 2023 menjadi Rp21,20 triliun pada triwulan III 2024. Di sisi lain, pendapatan lain-lain yang Sah menjadi komponen yang mengalami penurunan sebesar 72,49% dari Rp138,29 miliar menjadi Rp38,05 miliar.

2.3. Belanja dan Pendapatan Pemerintah Pusat

Secara nominal, realisasi belanja dan pendapatan APBN meningkat di Aceh. Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar Rp37,49 triliun (73,87% dari pagu anggaran) meningkat

dibanding triwulan III 2023 yang sebesar Rp32,99 triliun (68,66% dari pagu anggaran). Di sisi lain, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp5,05 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp4,78 triliun.

Tabel 2. 4. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan III 2024

REALISASI BELANJA APBN TRIWULAN III 2024

	Belanja Pusat	68,87%
	Transfer	76,82%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja Pusat mengalami peningkatan sebesar 13,60% dari Rp11,42 triliun menjadi Rp12,97 triliun. Komponen Belanja Pusat masih paling besar terdapat di Belanja Pegawai dengan proporsi sebesar 46,36%. Nilai Belanja Pegawai di tahun triwulan III 2024 sebesar Rp6,01 triliun lebih tinggi dibanding tahun 2023 di periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp5,19 triliun atau naik 15,80%. Peningkatan juga diikuti oleh Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial masing-masing tumbuh sebesar 7,0%; 23,30%; dan - 10,05%.

Belanja Transfer dalam APBN mengalami peningkatan secara persentase realisasi terhadap pagu maupun secara nominal realisasi. Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 76,82% dari pagu Transfer ke Daerah 2024 (secara nominal Rp24,52 triliun) dan tumbuh sebesar 13,64% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 71,49% dari pagu Transfer ke Daerah 2023 (secara nominal Rp21,57 triliun). Selanjutnya, peningkatan juga terjadi di seluruh komponen Belanja APBN di triwulan III 2024, yaitu Dana Transfer Umum; Transfer Khusus; Dana Otsus, DIY, dan DID serta Dana Desa mengalami peningkatan realisasi. Dana Otsus, DIY, dan DID merupakan komponen yang memiliki pertumbuhan paling besar dari Rp2,56 triliun menjadi Rp3,25 triliun atau tumbuh sebesar 21,17%. Selanjutnya, Dana Transfer Umum juga mengalami kenaikan 12,7% (yoy) dari Rp11,76 triliun menjadi Rp13,25 triliun pada triwulan III 2024. Kemudian, Dana Transfer Khusus menjadi

komponen dengan pertumbuhan paling kecil, yaitu 1,58% (yoy) dari Rp3,50 triliun menjadi Rp3,55 triliun di triwulan III 2024. Terakhir, Dana Desa meningkat sebesar 18,68% (yoy) dari Rp3,76 triliun menjadi Rp4,45 triliun.

Tabel 2. 5. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan III 2024

REALISASI PENDAPATAN APBN TRIWULAN III 2024

	Pajak	64,71%
	PNBP	149,42%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pendapatan Negara yang terdiri Pajak dan PNBP (Pajak Negara Bukan Pajak) secara nominal mengalami peningkatan. Secara nominal, Penerimaan Pajak pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,94% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi utamanya pada komponen Pajak Perdagangan Internasional yang meningkat 183,63% (yoy) atau secara nominal meningkat dari Rp82,48 miliar menjadi Rp233,94 miliar. Selain itu, Pajak Dalam Negeri meningkat sebesar 0,1% atau secara nominal naik dari Rp3,86 triliun dari triwulan III 2023 menjadi Rp3,86 triwulan III 2024).

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan III 2024

APBD PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Triwulan III		Realisasi Triwulan III		Persentase Realisasi		Pertumbuhan Realisasi Triwulan III
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
PENDAPATAN	37.393,70	39.467,73	23.261,28	25.123,31	62,21	63,66	8,00%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.482	6.051,31	3.686,46	3.879,87	67,25	64,12	5,25%
Pendapatan Transfer	31.461	32.999,30	19.436,53	21.205,40	61,78	64,26	9,10%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	451	417,12	138,29	38,05	30,66	9,12	-72,49%
BELANJA DAERAH	39.360,92	40.652,77	21.543,95	26.403,05	54,73	64,95	22,55%
Belanja Operasi	26.181,19	28.404,58	14.855,71	19.158,44	56,74	67,45	28,96%
Belanja Modal	4.507,43	3.958,59	1.787,11	1.519,52	39,65	38,39	-14,97%
Belanja Tidak Terduga	636,91	117,60	37,51	22,09	5,89	18,78	-41,11%
Transfer	8.035,39	8.172,00	4.863,62	5.703,00	60,53	69,79	17,26%
SURPLUS/DEFISIT	- 1.967,22	- 1.185,04	1.717,33	- 1.279,73	87,30	107,99	-174,52%

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Agustus 2024

Tabel 2. 7. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan III 2024

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Triwulan III		Realisasi Triwulan III		Persentase Realisasi		Pertumbuhan Realisasi Triwulan III
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
PENDAPATAN	6.405,69	6.332,19	4.778,99	5.053,10	74,61	79,80	5,74%
Pajak	5.635,04	6.143,25	3.942,24	4.097,37	69,96	66,70	3,94%
PNBP	770,65	188,94	836,75	955,73	108,58	505,84	14,22%
BELANJA	48.053,44	50.751,68	32.994,99	37.489,91	68,66	73,87	13,62%
Belanja Pusat	17.875,10	18.839,08	11.420,96	12.973,68	63,89	68,87	13,60%
Transfer ke Daerah	30.178,34	31.912,60	21.574,03	24.516,23	71,49	76,82	13,64%
SURPLUS/DEFISIT APBN	-41.647,75	-44.419,49	-28.216,00	-32.436,81	67,75	73,02	14,96%

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional November 2024



BAB III

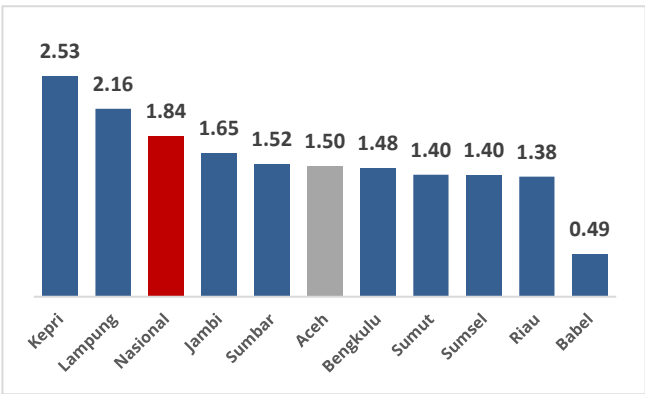
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 3,09% (yoy). Melandainya tekanan inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024, terutama bersumber dari deflasi komoditas makanan cabai merah dan penerapan diskon tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diterapkan pasca kenaikan tarif pada Juni 2024. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan cukai rokok dan tembakau, tarif air PDAM setelah diskon harga, serta berlanjutnya peningkatan harga emas perhiasan.

3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Inflasi Provinsi Aceh pada periode laporan tercatat sebesar 1,50% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (3,09%, yoy). Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan capaian inflasi Nasional (1,84% yoy) dan masih terkendali pada rentang sasaran target inflasi tahun 2024 yaitu sebesar $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy) (Grafik 3.1). Masih terkendalinya inflasi pada rentang sasaran target inflasi tahun 2024, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan TPID se-Provinsi Aceh. Sinergi dan kolaborasi intens dalam rangka pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif).

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan III 2024 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Penurunan tekanan inflasi pada triwulan III 2024 terjadi pada sebagian besar kelompok komoditas. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki menjadi kelompok pengeluaran dengan andil deflasi tertinggi diikuti oleh kelompok informasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan. Penurunan inflasi yang lebih dalam pada triwulan III 2024 tertahan oleh inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 0,48%; yoy), kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga (andil 0,31%; yoy), kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 0,30%; yoy), serta kelompok

Penyediaan Makanan dan Minuman (andil 0,27%; yoy).

Berdasarkan komoditasnya, penyumbang andil deflasi terbesar pada triwulan III 2024 diantaranya cabai merah, tomat, dan aneka ikan (ikan dencis, ikan tongkol, ikan kembung). Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi lebih dalam tertahan oleh komoditas dengan andil inflasi tertinggi yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM), beras, cabai rawit, gula pasir, kopi siap saji, dan minyak goreng.

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Kelompok Barang dan Jasa	Tw II 2024		Tw III 2024	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	6,19	2,25	1,31	0,48
Pakaian dan Alas Kaki	1,62	0,10	-0,73	-0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,52	-0,09	1,96	0,31
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,71	0,07	1,39	0,05
Kesehatan	2,59	0,05	1,88	0,03
Transportasi	1,11	0,12	0,18	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,44	-0,03	-0,56	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,14	0,04	3,17	0,04
Pendidikan	0,66	0,03	1,37	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,90	0,31	2,51	0,27
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,41	0,24	5,51	0,30
Inflasi Umum	3,09		1,50	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 1,31% (yoy)		ANDIL 0,48%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sigaret Kretek Mesin	0,39	Cabai Merah	0,33
Beras	0,27	Tomat	0,25
Cabai Rawit	0,09	Ikan Dencis	0,09
Gula Pasir	0,09	Ikan Kembung	0,05
Minyak Goreng	0,07	Ikan Tongkol	0,04

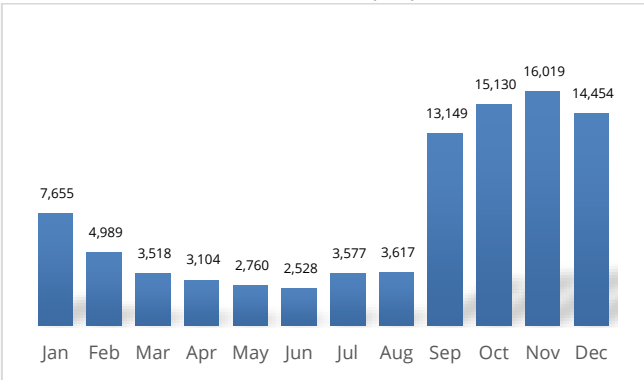
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini

tercatat mengalami penurunan dari 6,19% (yoy) pada triwulan II 2024 menjadi 1,31% (yoy) pada triwulan pelaporan dengan andil 0,48% (yoy) (tabel 3.2). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh sub kelompok makanan yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,24%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya dengan tingkat inflasi 1,83% (yoy).

Penurunan tekanan inflasi terbesar pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh komoditas pangan cabai merah, tomat, dan aneka ikan (dencis, kembung, tongkol). Berdasarkan pantauan data PIHPS, rata-rata harga cabai merah pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp39.900/kg lebih rendah dari triwulan II 2024 (Rp58.150/kg) atau mengalami penurunan harga sebesar 31,38% (qtq). Penurunan harga ini lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,27% (qtq). Deflasi yang terjadi pada komoditas cabai merah disebabkan oleh melimpahnya pasokan seiring dimulainya masa musim panen cabai merah hingga akhir tahun 2024 di Provinsi Aceh, serta adanya tambahan pasokan cabai merah dari luar daerah.

Grafik 3.2. Sasaran Produksi Komoditas Cabai Merah Tahun 2024 (ton)



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, diolah

Kenaikan tarif cukai berdampak pada berlanjutnya kenaikan harga komoditas rokok dan tembakau. Tekanan inflasi pada subkelompok rokok dan tembakau didorong oleh keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara gradual sejak awal tahun 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Tabel 3.3. Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI -0,73% (yoy)		ANDIL -0,04%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tidak Dipublikasi		Baju Muslim Wanita	0,05
Tidak Dipublikasi		Baju Anak Stelan	0,01
Tidak Dipublikasi		Baju Kaos Tanpa Kerah	0,01
Tidak Dipublikasi		Gaun	0,01
Tidak Dipublikasi		Blus Wanita	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki merupakan penyumbang deflasi tertinggi pada triwulan III 2024. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki tercatat mengalami mencatatkan deflasi sebesar 0,73% (yoy) dengan andil sebesar -0,04% pada triwulan III 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,62% (yoy). Penurunan tekanan inflasi disumbang terutama oleh sub kelompok pakaian dengan deflasi sebesar 1,30% (yoy). Komoditas baju muslim wanita menjadi komoditas penyumbang deflasi utama pada sub kelompok pakaian utama dengan andil sebesar -0,05% (yoy). Penurunan tekanan inflasi lebih dalam tertahan oleh sub kelompok alas kaki yang tercatat mengalami inflasi sebesar 2,03%.

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI 1,96% (yoy)		ANDIL 0,31%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tarif Air Minum PDAM	0,32	Tidak Dipublikasi	
Kontrak Rumah	0,06	Tidak Dipublikasi	
Pasir	0,02	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga tercatat memberikan andil inflasi terbesar kedua, yaitu sebesar 0,31%. Pada triwulan III 2024, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami inflasi sebesar 1,96% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari sub kelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 27,02% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2024 pada Juni 2024 untuk menaikkan tarif air minum PDAM akibat peningkatan biaya operasional perusahaan, terutama bersumber dari peningkatan harga bahan kimia untuk pengolahan air bersih. Adapun, kenaikan tarif rata-rata air minum sebesar 30%. Komoditas tarif air minum PDAM memberikan andil inflasi sebesar 0,32% (yoy).

Inovasi diskon tarif PDAM, sebagai langkah strategis untuk menjaga inflasi berada pada sasarannya. Melalui sinergi dan rekomendasi TPID Provinsi Aceh, Pemkot Banda Aceh memutuskan untuk memberikan inovasi kebijakan pengendalian inflasi daerah dalam bentuk diskon tarif air PDAM sebesar 30% untuk golongan pengguna terbanyak RT1 dan RT2 pada September 2024. Kebijakan dilakukan melalui Surat Walikota Kota Banda Aceh tentang Diskon Tarif Air No. 900/0851 kepada Perumdam Tirta Daroy. Melalui kebijakan ini, andil inflasi tarif air PDAM berhasil diredam di bulan September dibandingkan bulan Agustus. Andil inflasi komoditas tersebut turun dari 1,63% (yoy) menjadi 0,85% di Banda Aceh dan turun dari 0,61% (yoy) menjadi 0,32% di Provinsi Aceh.

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 1,39% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Kasur	0,01	Tidak Dipublikasi	
Upah Asisten Rumah Tangga	0,01	Tidak Dipublikasi	
Gelas Minum	0,01	Tidak Dipublikasi	
Lemari Pakaian	0,01	Tidak Dipublikasi	
Deterjen Cair	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2024, tekanan inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga mengalami penurunan. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 1,39% (yoy) dengan andil 0,05%, andil inflasi pada triwulan pelaporan lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (0,07%). Penahan tekanan inflasi bersumber dari sub kelompok Peralatan Rumah

Tangga yang mengalami deflasi sebesar 1,01% (yoy) dengan andil -0,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,91% (yoy). Di lain sisi, komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar diantaranya komoditas kasur, upah asisten rumah tangga, gelas minum, lemari pakaian, dan deterjen cair masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Kel. Kesehatan

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 1,88% (yoy)		ANDIL 0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Obat Dengan Resep	0,01	Tidak Dipublikasi	
Tarif Dokter	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju inflasi kelompok kesehatan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara tahunan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,88% (yoy) dengan andil 0,03%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,05%). Penurunan tekanan inflasi terdalam terjadi pada sub kelompok Obat-Obatan dan Produk Kesehatan dengan tingkat inflasi sebesar 2,20% (yoy), turun dari triwulan II 2024 yang sebesar 3,21% (yoy).

Tekanan inflasi kelompok kesehatan pada triwulan pelaporan dipicu oleh sub kelompok jasa kesehatan lainnya. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 8,41% (yoy) dengan harga komoditas yang meningkat utamanya, yaitu obat dengan resep dan tarif dokter. Sedangkan, inflasi terendah terjadi pada sub kelompok jasa rawat inap sebesar 0,06% (yoy).

Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 0,18% (yoy)		ANDIL 0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Pemeliharaan	0,01	Tidak Dipublikasi	
Cuci Kendaraan	0,01	Tidak Dipublikasi	
Sepeda Motor	0,01	Tidak Dipublikasi	
Pelumas	0,01	Tidak Dipublikasi	
Mobil	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Penurunan tekanan inflasi pada kelompok Transportasi didorong oleh Sub Kelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi terutama komoditas bensin. Kelompok transportasi tercatat mengalami penurunan tekanan inflasi yaitu menjadi 0,18% (yoy) dengan andil 0,02%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,11% (yoy). Tertahannya tekanan inflasi kelompok transportasi dipicu oleh penurunan harga BBM non subsidi di seluruh provinsi melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM pada 1 September 2024. Selain itu, komoditas tarif angkutan udara dan angkutan antar kota mengalami penurunan harga signifikan setelah pada triwulan sebelumnya meningkat karena adanya perpanjangan hari libur cuti bersama Idul Adha 1445H di Provinsi Aceh. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Hari Raya yang diperpanjang menjadi 4 hari (17- 20 Juni) dari sebelumnya hanya 2 hari (17-18 Juni).

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI -0,56% (yoy)		ANDIL -0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tidak Dipublikasi		Telepon Seluler	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, tercatat kembali mengalami deflasi pada periode triwulan III 2024. Kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar 0,56% (yoy) dengan andil -0,02%, lebih rendah dari deflasi sebelumnya yang sebesar 0,44% (yoy). Deflasi bersumber dari subkelompok peralatan informasi dan komunikasi dengan deflasi sebesar 0,02% (yoy). Komoditas telepon seluler berkontribusi terhadap angka deflasi dengan andil -0,01% (yoy).

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 3,17% (yoy)		ANDIL 0,04%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tas Sekolah	0,01	Tidak Dipublikasi	
Mainan Anak	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2024, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 3,17% (yoy) dengan andil 0,04%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh sub kelompok Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah yang tercatat mengalami inflasi sebesar 3,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,99% (yoy). Sementara, komoditas yang menjadi pendorong inflasi, yaitu tas sekolah dan mainan anak dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen.

Kel. Pendidikan

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 1,37% (yoy)		ANDIL 0,06%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Akademi/Perguruan Tinggi	0,02	Tidak Dipublikasi	
Uang Sekolah Dasar	0,02	Tidak Dipublikasi	
Taman Kanak-kanak	0,01	Tidak Dipublikasi	
Uang Sekolah Menengah Pertama	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Inflasi kelompok pendidikan mengalami peningkatan didorong oleh meningkatnya biaya akademi/ perguruan tinggi dan uang Sekolah Dasar. Pada triwulan III, kelompok pendidikan mengalami peningkatan tekanan inflasi menjadi 1,37% (yoy) dengan andil 0,06% dari inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,66% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini dampak dari dimulainya periode tahun ajaran baru untuk perguruan tinggi.

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 2,51% (yoy)		ANDIL 0,27%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Nasi dengan Lauk	0,07	Tidak Dipublikasi	
Kopi Siap Saji	0,07	Tidak Dipublikasi	
Bakso Siap Santap	0,06	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,51% (yoy) dengan andil 0,27%, lebih rendah dari inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,90% (yoy). Pada triwulan III tekanan inflasi kelompok ini terutama terjadi pada komoditas nasi dengan lauk yang tercatat dengan andil sebesar 0,07% (yoy), lebih rendah dari triwulan II 2024 (0,11%). Selanjutnya, deflasi pada sub kelompok makanan yang juga mengalami penurunan inflasi pada triwulan III 2024 menjadi sebesar -0,07% dari triwulan sebelumnya sebesar 1,83%.

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 5,51% (yoy)		ANDIL 0,30%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,31	Tidak Dipublikasi	

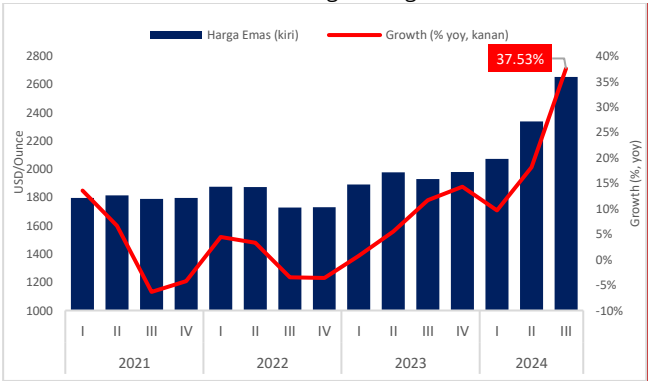
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi dengan andil yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Pada triwulan pelaporan, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat sebesar 5,51% (yoy) dengan andil sebesar 0,30% lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024. Pendorong inflasi terutama berasal dari subkelompok perawatan pribadi lainnya yang mengalami peningkatan inflasi dari 13,39% (yoy) menjadi 15,80% (yoy) di triwulan III 2024.

Komoditas emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi kelompok perawatan pribadi dan

jasa lainnya. Andil komoditas ini mencapai 0,31% pada periode pelaporan. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas global karena meningkatnya tekanan geopolitik di Timur Tengah dan ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunga. Harga emas dunia di triwulan III 2024 mengalami peningkatan sebesar 37,53% (yoy) (Grafik 3.2). Harga emas pada triwulan III 2024 berada pada level USD2.653/ounce. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD2.337/ounce.

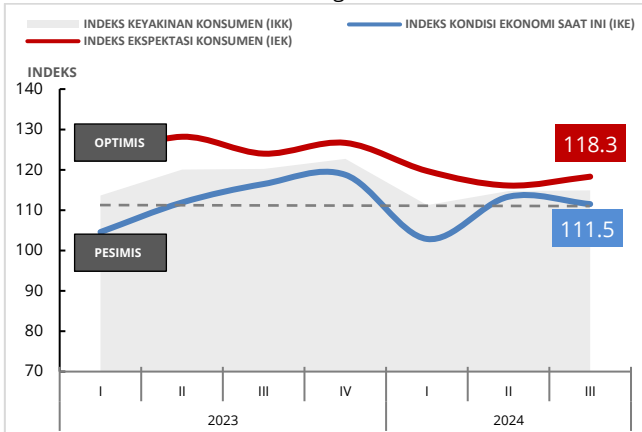
Grafik 3.3. Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, diolah

Laju inflasi triwulan III 2024 yang terkendali didorong oleh keyakinan dan ekspektasi masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang berada di batas atas level optimis (100). Pada triwulan III 2024, IKK tercatat sebesar 114,9 atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, IEK tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 118,3. Sedangkan IKE mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 111,5.

Grafik 3.4. Perkembangan Survei Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

3.3. Tracking Inflasi Triwulan IV 2024

Pada bulan Oktober 2024, tingkat inflasi Provinsi Aceh tetap terjaga sesuai rentang inflasi nasional sejalan dengan penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan beras. Melalui sinergi yang baik dalam TPID, inflasi di Provinsi Aceh tetap terjaga dalam batasan sasaran inflasi nasional. IHK gabungan 5 (lima) kota di Aceh bulan Oktober 2024 mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm) dengan inflasi tahunan terjaga sebesar 1,69% (yoy) dan secara kumulatif sebesar 1,23% (ytd). Secara bulanan, deflasi tersebut lebih rendah dari deflasi bulan sebelumnya yang tercatat lebih dalam sebesar 0,52% (mtm).

Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, laju inflasi Aceh secara tahunan lebih rendah sebesar 0,02% basis poin. Deviasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata deviasi inflasi Aceh terhadap Nasional dari tahun 2020 – 2023 sebesar 0,68%. Secara bulanan, tekanan inflasi Oktober 2024 didorong oleh peningkatan tekanan inflasi *administered price*, terutama dari komoditas Tarif Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai dampak peningkatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara gradual di awal tahun 2024.

Tekanan inflasi terutama terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,07% (mtm) dengan komoditas emas perhiasan

sebagai penyumbang utama. Peningkatan harga komoditas emas perhiasan tercatat masih terus meningkat sejalan dengan kenaikan harga emas global dampak eskalasi konflik geopolitik.

Hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) menunjukkan laju inflasi November 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh tekanan inflasi komoditas *volatile food* akibat terbatasnya pasokan dan normalisasi harga pasca deflasi beberapa bulan terakhir.

Pada triwulan IV 2024, laju inflasi tahunan Provinsi Aceh diperkirakan akan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dipicu oleh momen Pilkada serentak dan tradisi kenduri Maulid Nabi. Pelaksanaan kampanye Pilkada yang berlangsung selama 60 hari dari 25 September – 23 November 2024 berpotensi meningkatkan permintaan akibat peningkatan konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, prakiraan cuaca menunjukkan potensi terjadinya La Nina Lemah hingga awal tahun 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia, hal ini berpotensi meningkatkan tekanan inflasi akibat bencana hidrometeorologi dibandingkan triwulan sebelumnya.

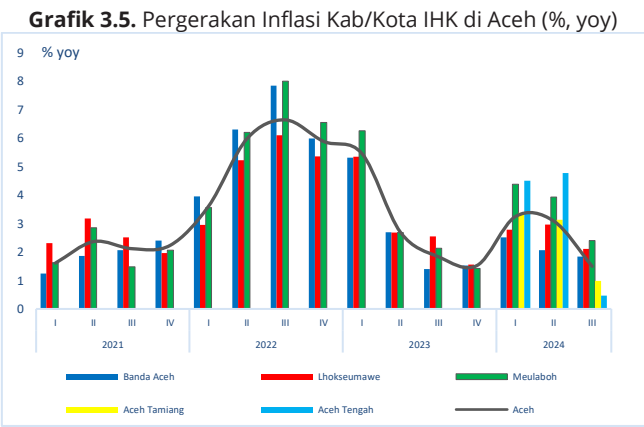
Selain itu, laju inflasi triwulan IV 2024 diperkirakan didorong oleh perayaan tradisi peringatan Maulid Nabi. Adapun, tradisi kenduri di Provinsi Aceh berlangsung selama 100 hari yang dimulai sejak 12 rabiul awal (16 September 2024) dengan tradisi saling memberikan hidangan makanan antar desa berupa aneka daging.

Untuk itu, kolaborasi dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh perlu ditingkatkan guna menjaga capaian inflasi tetap berada pada sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

3.4. Inflasi Spasial

Tekanan inflasi pada triwulan III 2024 tercatat mengalami penurunan pada seluruh Kabupaten/kota pantauan di Provinsi Aceh. Aceh tengah menjadi kota yang mengalami inflasi paling rendah, yakni 0,47% (yoy) sedangkan paling tinggi, yaitu Kota Meulaboh sebesar 2,40% (yoy).

Sementara secara inflasi bulanan, Banda Aceh menjadi kota dengan tingkat inflasi terendah, yaitu -0,89% (mtm) dan tertinggi, yaitu Lhokseumawe sebesar 0,14% (mtm).



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Komoditas cabai merah tercatat sebagai penyumbang deflasi (mtm) tertinggi sebesar 0,16% di Kota Banda Aceh. Sementara, komoditas pisang menjadi penyumbang inflasi terbesar yang menahan deflasi lebih dalam dengan andil 0,05% (mtm).

Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% mtm)

Banda Aceh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Pisang	0,05	Cabai Merah	0,16
Udang Basah	0,04	Ikan Dencis	0,04
Jus Buah Siap Saji	0,02	Ikan Cakalang	0,03
Cumi-cumi	0,02	Kentang	0,02
Ikan Tongkol	0,01	Tomat	0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, komoditas penyumbang deflasi (mtm) terbesar di Kota Lhokseumawe yaitu cabai merah dengan andil sebesar 0,17%. Sedangkan, laju penurunan inflasi lebih dalam tertahan oleh komoditas udang basah dengan andil sebesar 0,12% (mtm).

Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% mtm)

Lhokseumawe			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Udang Basah	0,12	Cabai Merah	0,17
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,06	Ikan Dencis	0,03
Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu	0,05	Bensin	0,02
Daging Ayam Ras	0,03	Cumi-cumi	0,02

Ayam Hidup	0,03	Beras	0,02
------------	------	-------	------

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tekanan inflasi lebih tinggi di kota Meulaboh tertahan oleh komoditas cabai merah sebagai komoditas penyumbang deflasi terbesar (0,18%, mtm). Sementara, komoditas penyumbang inflasi terbesar tercatat berasal dari komoditas ikan Dencis dengan andil sebesar 0,10%.

Tabel 3.15 Andil Inflasi di Meulaboh (% mtm)

Meulaboh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Ikan Dencis	0,10	Cabai Merah	0,18
Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	0,08	Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	0,12
Cabai Rawit	0,05	Shampo	0,05
Minyak Goreng	0,05	Bensin	0,04
Bawang Merah	0,03	Hand Body Lotion	0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sementara, deflasi (mtm) di Aceh Tamiang didorong oleh komoditas cabai merah dengan andil sebesar 0,45%. Kemudian penurunan deflasi lebih dalam dapat tertahan oleh komoditas kopi bubuk dengan andil inflasi terbesar, yaitu 0,12% (mtm).

Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% mtm)

Aceh Tamiang			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Kopi Bubuk	0,12	Cabai Merah	0,45
Cabai Rawit	0,08	Beras	0,15
Kelapa	0,07	Udang Basah	0,10
Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	0,05	Daging Ayam Ras	0,10
Salak	0,05	Ikan Biji Nangka/ Kuniran	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Terakhir, laju inflasi di Aceh Tengah utamanya tertahan oleh komoditas cabai merah dengan andil sebesar 0,42%. Di sisi lain, komoditas yang memberikan inflasi terbesar adalah komoditas cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,06%.

Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah (% mtm)

Aceh Tengah			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Cabai Rawit	0,06	Cabai Merah	0,42
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,05	Kentang	0,10
Biskuit	0,04	Tomat	0,07

Ikan Tongkol	0,03	Cabai Hijau	0,07
Ikan Bandeng	0,02	Bensin	0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.5. Aktivitas Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Pada triwulan III 2024, inflasi di Provinsi Aceh tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam menjaga terkendalinya inflasi agar tetap berada pada sasaran $2,5\% \pm 1\%$, TPID Aceh menghadapi berbagai tantangan antara lain bersumber dari berlangsungnya momen Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024, Pilkada serentak, dan kenaikan tarif air minum PDAM.

Oleh karena itu, KPw BI Aceh bersama dengan TPID Aceh mengambil langkah strategis untuk pengendalian inflasi yang efektif dan efisien.

Strategi tersebut mulai dari pasar murah di 57 kecamatan di kab/kota IHK serta fasilitasi distribusi komoditas bawang merah dan cabai merah ke pedagang besar di pasar induk bekerjasama dengan Bapanas. Dalam rangka menjalankan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh. Pada triwulan III 2024 kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

1. Keterjangkauan Harga

- Pelaksanaan program sinergi operasi pasar murah melalui SPHP dan GPM utamanya di 5 (lima) kab/kota IHK di Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara terjadwal dan serentak.
- Pelaksanaan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
- Himbauan kepada Pimpinan Hotel/Penginapan; Restoran/Rumah Makan; serta Kafe atau Warkop untuk tidak menaikkan harga dan daftar harga layanan melalui Surat Walikota Banda Aceh No. 426/0755.
- Pemberian diskon pada tarif PDAM di Kota Banda Aceh sebesar 30% untuk kelompok

Rumah Tangga 1 dan sebesar 10% untuk Rumah Tangga 2.

- Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar di halaman Kantor Dinas Pertanian Aceh Utara
- #### 2. Ketersediaan Pasokan
- Mendorong program peningkatan produksi di daerah sentra a.l. melalui optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan.
 - Mendorong *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis.
 - Mendorong *contract farming* antara UMKM dan kelompok tani komoditas pangan strategis.
 - Mengakselerasi program Kerja Sama antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis, utamanya di 5 (lima) kabupaten/kota IHK di Provinsi Aceh dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
 - Memperkuat KAD daerah sentra dan non sentra serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.
 - Gerakan Tanam Cabai di Lahan Kosong di Pekarangan Meuligoe.
 - Pompanisasi untuk 66 Poktan di Pidie, pemberian benih jagung, dan alsintan.
 - KAD Pemkab Pidie dan Pemkot Lhokseumawe
 - Peningkatan produksi padi melalui perluasan areal tanam melalui bantuan 270 unit pompa dari Kementerian Pertanian RI
- #### 3. Kelancaran Distribusi
- Pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis dari daerah sentra ke non sentra dengan mempertimbangkan kebutuhan pasokan antar daerah.
 - Mendorong pemanfaatan agen/warung/toko TPID/*mini distribution center*.
 - Peninjauan Pasar Induk Lambaro oleh TPID Aceh Besar

- d. Peninjauan Pasar Terpadu Blangkejeren oleh TPID Gayo Lues
 - e. Sidak Pasar
4. Komunikasi Efektif
- a. Pelaksanaan *Capacity Building* kepada TPID se-Provinsi Aceh dengan tujuan *refreshment*, peningkatan pemahaman, serta penguatan sinergi antar TPID se-Provinsi Aceh dalam pengendalian inflasi.
 - b. Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID Provinsi Aceh dan TPID Kabupaten/Kota IHK se-Provinsi Aceh dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi serta antisipasi risiko inflasi tahun 2024.
 - c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan yang dihadiri TPID Provinsi Aceh dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
 - d. Optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai *early warning system* inflasi.



BAB IV

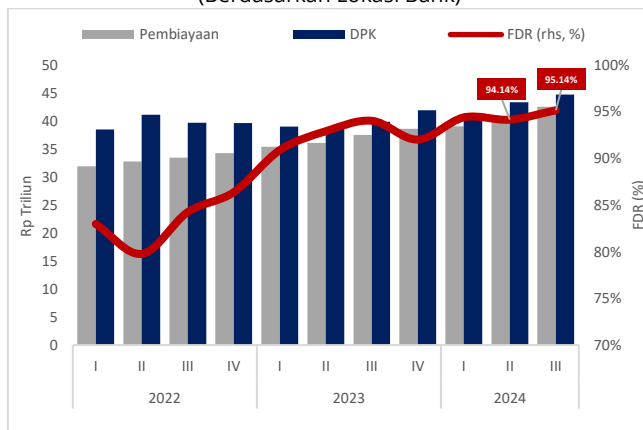
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 tetap terjaga, hal ini tercermin dari rendahnya *Non Performing Financing* (NPF). Sementara itu, kinerja pembiayaan tercatat tumbuh 13,35% (yoy). Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 12,11% (yoy). Di sisi lain, rasio pembiayaan untuk UMKM tercatat sebesar 28,27%.

4.1. Kondisi Umum

Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, tercermin dari peningkatan kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) diiringi dengan peningkatan kinerja penyaluran pembiayaan. Berdasarkan lokasi bank, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp44,70 triliun atau meningkat sebesar 12,11% (yoy). Sementara itu, penyaluran pembiayaan masih positif tercatat Rp42,52 triliun atau meningkat sebesar 14,45% (yoy). Dengan demikian *Financing Deposit Ratio* (FDR) 95,14% mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 94,14% (Grafik 4.1). Hal ini mencerminkan bahwa secara nominal, peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan lebih rendah dibandingkan peningkatan jumlah DPK yang dihimpun.

Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan III 2024 menunjukkan kondisi yang terjaga. Secara agregat, risiko pembiayaan di Provinsi Aceh masih terjaga dalam batas aman yang tercermin dari NPF sebesar 1,64% di tengah peningkatan kinerja pembiayaan yang antara lain di dorong oleh penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) (Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoh, dan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh).

Kinerja penghimpunan DPK terpantau mengalami peningkatan. Pada triwulan III 2024, nominal DPK mencapai Rp44,70 triliun atau tumbuh sebesar 12,11% (yoy), meningkat dari triwulan

sebelumnya 11,56% (yoy). Peningkatan tersebut terjadi di sektor korporasi, DPK Korporasi tercatat tumbuh 31,98% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 25,73% (yoy). Meningkatnya DPK Korporasi seiring peningkatan pendapatan korporasi di tengah peningkatan permintaan domestik dan menguatnya ekspor luar negeri. Sementara itu, DPK perseorangan di perbankan juga terpantau meningkat dari 6,95% (yoy) menjadi 7,79% (yoy). Lebih lanjut, DPK pemerintah tercatat tumbuh 12,88% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 17,51% (yoy).

Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan meningkat terbatas. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek pada triwulan III 2024 sebesar Rp51,11 triliun atau tumbuh sebesar 2,46% (yoy). Mencermati perkembangan tersebut FDR berdasarkan lokasi proyek tercatat relatif tinggi pada periode laporan yakni sebesar 114,33% lebih rendah dari triwulan sebelumnya 114,77% (Grafik 4.2).

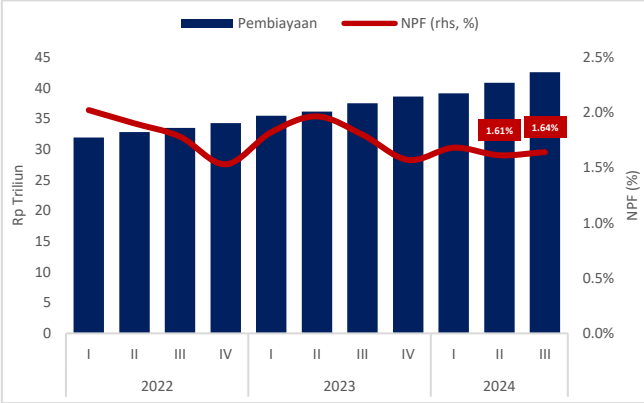
Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, **Non Performing Financing (NPF)** berdasarkan lokasi bank masih pada **rentang aman**. NPF pada triwulan III 2024 mencapai 1,64%, sedikit lebih tinggi dibanding triwulan II 2024 yang sebesar 1,61% (Grafik 4.4.), masih berada di bawah *threshold* 5%.

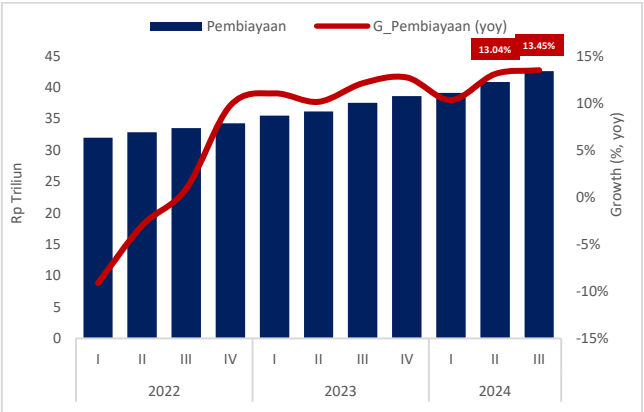
Grafik 4. 4 Perkembangan *Non-Performing Financing* (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan tumbuh positif dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan berdasarkan lokasi bank kembali menunjukkan tren yang positif yaitu tumbuh sebesar 13,45% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 13,04% (yoy).

Grafik 4. 5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)

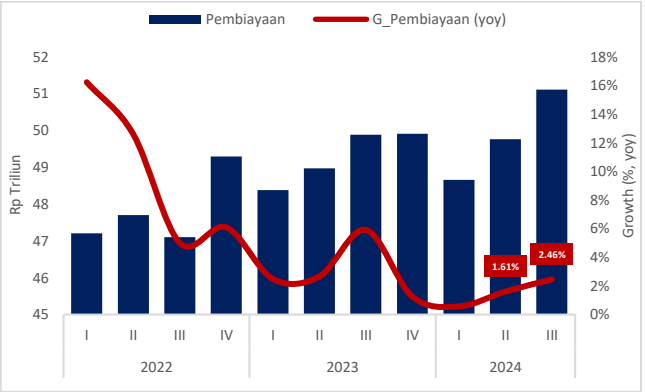


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dari luar Aceh terus mengalami peningkatan. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp49,76 triliun, atau tumbuh pada tingkat 2,46% (yoy). Penyaluran pembiayaan tersebut meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp49,76 triliun. Namun demikian, secara

nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan berdasarkan lokasi bank. Hal mengindikasikan bahwa pembiayaan di Aceh masih mengandalkan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

Grafik 4. 6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)



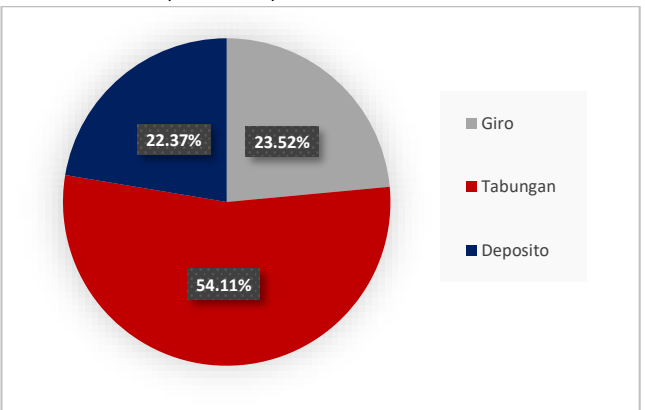
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1. DPK Menurut Jenisnya

Tabungan masih mendominasi komposisi DPK di Aceh. Pada periode laporan, DPK di Aceh didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 54,11%, diikuti giro sebesar 23,52% dan deposito sebesar 22,37%. Secara nominal, total DPK pada triwulan III 2024 adalah sebesar Rp44,70 triliun, yang terdiri dari tabungan Rp24,19 triliun, giro sebesar Rp10,51 triliun, dan deposito Rp10,00 triliun.

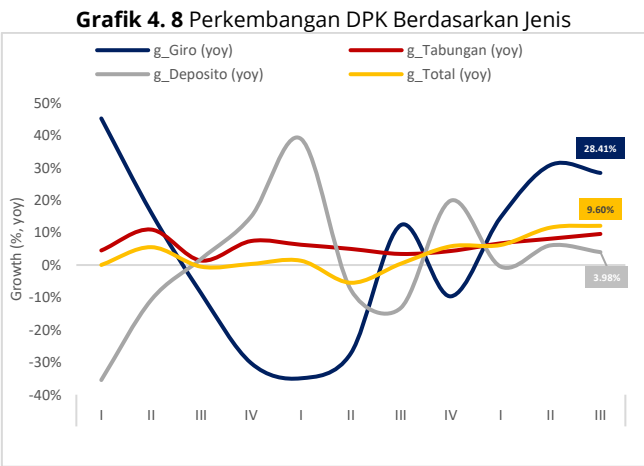
Grafik 4. 7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, hanya jenis DPK tabungan yang mengalami peningkatan. Pada triwulan III 2024, giro dan deposito merupakan komponen DPK yang mengalami perlambatan

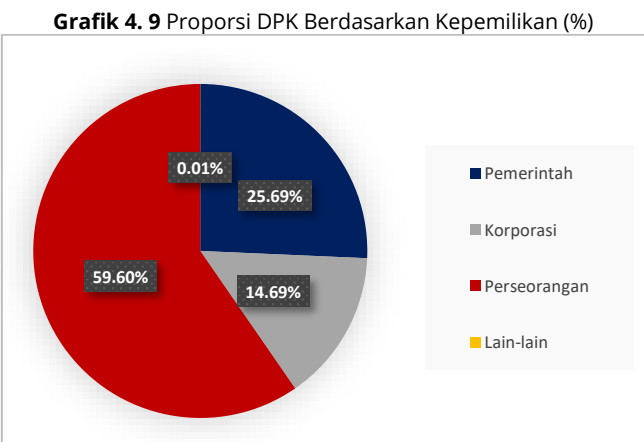
masing-masing sebesar 28,41% (yoy) dan 3,96% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 30,85% (yoy) dan 6,08% (yoy). Adapun tabungan menjadi satu-satunya jenis DPK yang mengalami peningkatan sebesar 9,60% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,12% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

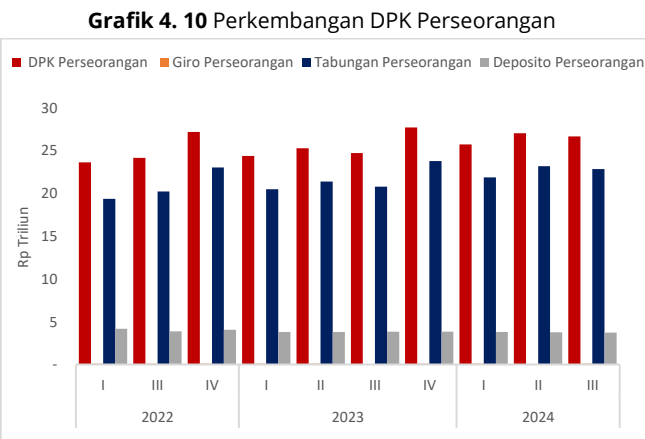
Berdasarkan kepemilikannya, DPK di Aceh masih didominasi oleh kepemilikan perseorangan. DPK milik perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 59,60%. Sementara, DPK milik pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki porsi sebesar 25,69% dan 14,69%.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

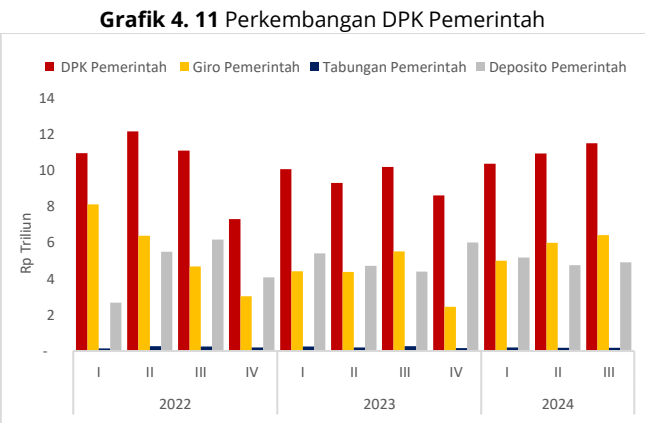
DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari tabungan memiliki porsi sebesar 85,80%, deposito memiliki porsi sebesar 13,91%, dan giro memiliki porsi sebesar 0,29%. Secara pertumbuhan, DPK perseorangan dalam bentuk tabungan dan giro

mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9,89% (yoy) dan 3,10% (yoy). Sementara itu deposito mengalami kontraksi yang semakin dalam 3,50% (yoy). Peningkatan tabungan mengindikasikan masyarakat cenderung membutuhkan dana dengan likuiditas yang tinggi seiring dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

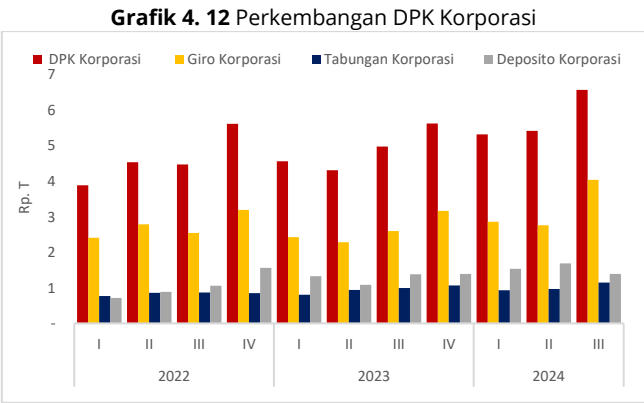
Perkembangan DPK pemerintah pada triwulan laporan masih terjaga. Pada triwulan laporan, pertumbuhan DPK pemerintah mengalami perlambatan menjadi sebesar 12,88% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 17,51% (yoy). Perlambatan DPK pemerintah disebabkan oleh penurunan pertumbuhan tabungan sebesar 31,98% (yoy) serta melambatnya pertumbuhan giro sebesar 16,16% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 36,73% (yoy). Sedangkan deposito mengalami peningkatan sebesar 11,50% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 0,81% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK korporasi masih didominasi oleh giro. Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan

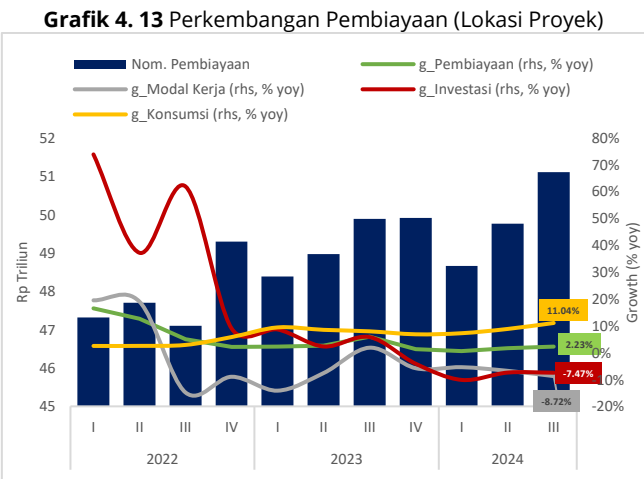
terdiri dari giro sebesar 61,41%, deposito sebesar 21,18%, dan tabungan sebesar 17,41%. DPK korporasi jenis giro mengalami peningkatan tertinggi sebesar 55,11% (yoy), diikuti oleh jenis tabungan sebesar 14,67% (yoy). Sedangkan DPK jenis deposito mengalami perlambatan yang cukup dalam sebesar 0,88% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

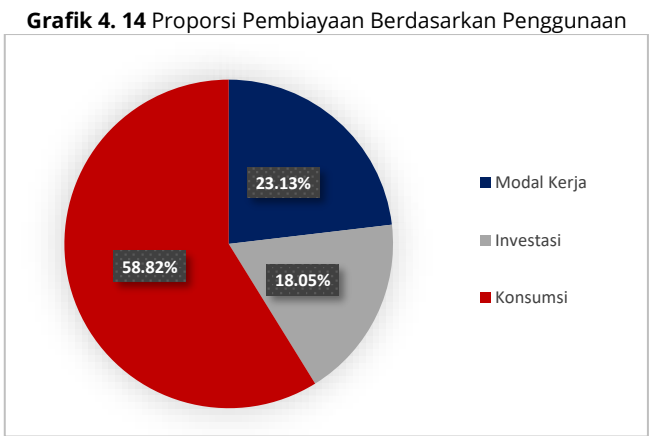
4.2.2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan III 2024 meningkat sebesar 2,46% (yoy). Adapun pembiayaan konsumsi masih mendominasi pembiayaan di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh jenis pembiayaan konsumsi sebesar 11,04% (yoy). Sementara pembiayaan modal kerja dan investasi masih mengalami kontraksi secara berturut-turut sebesar 8,72% (yoy) dan 7,47% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 58,82%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 41,18%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 18,05% dan 23,13% dari total pembiayaan pada triwulan laporan. Penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi yang menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor-sektor produktif belum tersalurkan secara optimal.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

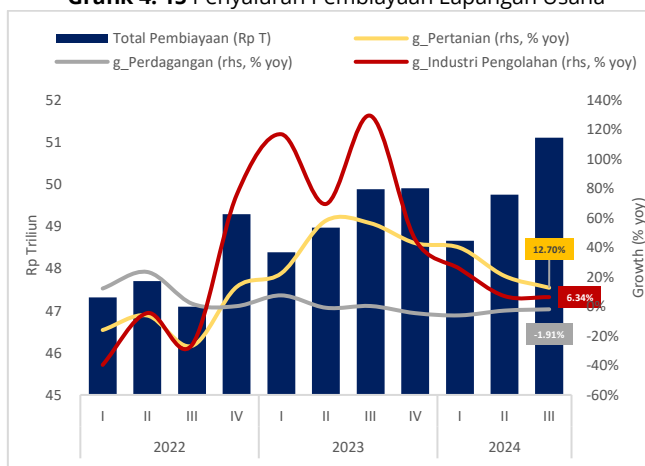
Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan membaiknya aktivitas konsumsi yang dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen yang berada pada zona optimis. Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis hingga bulan September 2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan September 2024 tercatat terjaga optimis sebesar 114,90 lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 114,71.

4.2.3. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)

Pangsa pembiayaan terbesar menurut lapangan usaha didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan III 2024, porsi pembiayaan terhadap LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat 13,14%. Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Perdagangan

Besar dan Eceran masih berkontraksi sebesar 1,91% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam yakni sebesar 2,80% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan memiliki porsi pembiayaan masing-masing sebesar 8,93% dan 8,26%. Pada triwulan III 2024, kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan tercatat mengalami perlambatan masing-masing sebesar sebesar 12,70% (yoy) dan 6,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 20,71% (yoy) dan 7,03% (yoy).

Grafik 4. 15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha



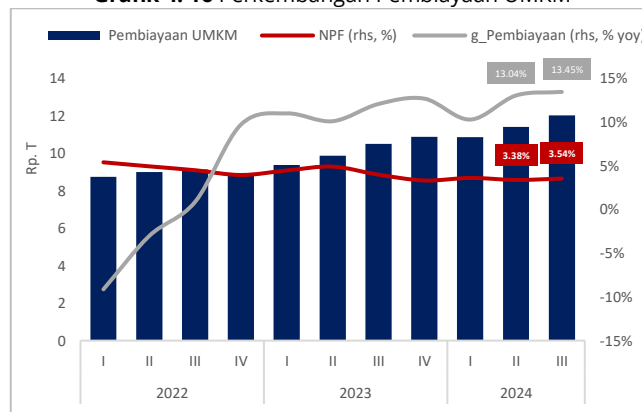
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.4. Pembiayaan UMKM

Kinerja pembiayaan UMKM pada triwulan III 2024 mengalami perlambatan, walaupun secara nominal mengalami peningkatan. Kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat sebesar 14,51% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,57% (yoy). Namun demikian, secara nominal pembiayaan UMKM pada triwulan III mengalami peningkatan sebesar Rp12,02 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar Rp11,40 triliun. Adapun rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan UMKM adalah sebesar 3,54%. Sementara itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan III 2024 sebesar 28,27%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM. Hal ini dilakukan dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan di seluruh wilayah Indonesia juga turut mendorong kinerja UMKM melalui berbagai program pendampingan.

Grafik 4. 16 Perkembangan Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah.

4.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh

KPw BI Provinsi Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. KPw BI Provinsi Aceh secara konsisten terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM untuk mendukung optimalisasi pembiayaan di daerah dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM diantaranya melalui program pengembangan UMKM seperti pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan melalui optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi

Keuangan (SIAPIK), survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID), dan fasilitasi perluasan akses pasar maupun promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu upaya dalam peningkatan akses pembiayaan UMKM, KPw BI Provinsi Aceh telah melaksanakan kegiatan Festival Meuseuraya. Kegiatan tersebut menghasilkan *business matching* pembiayaan mencapai Rp8,6 miliar dengan melibatkan 4 (empat) perbankan dan 35 UMKM.

Di samping itu, KPw BI Provinsi Aceh menyelenggarakan program pengembangan kapasitas wirausaha melalui Program Pengembangan Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di Provinsi Aceh sehingga dapat naik kelas, terutama bagi wirausaha yang mendukung program pengendalian inflasi Bank Indonesia. Di samping itu, program WUBI ditujukan untuk mendorong ekspor atau substitusi impor, pariwisata, serta mendukung ekonomi dan keuangan syariah, dan mengembangkan produk dan jasa unggulan daerah. Lebih lanjut, melalui program WUBI dapat menciptakan ekosistem wirausaha di Provinsi Aceh yang mendukung upaya percepatan pengembangan usaha sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah.



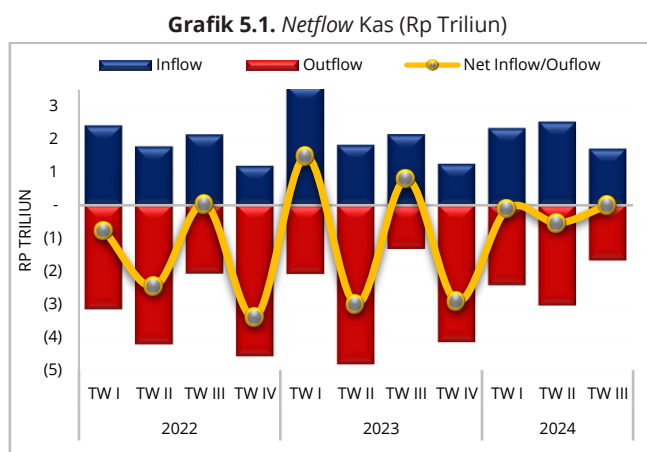
BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan III 2024, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net inflow* pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

5.1. Sistem Pembayaran Tunai

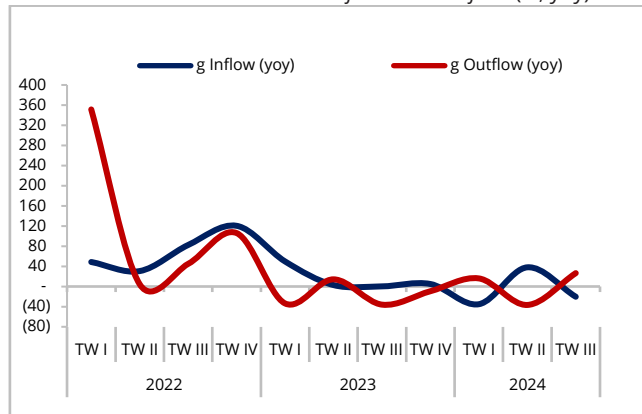
Pada triwulan III 2024, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net inflow*¹. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net inflow* sebesar Rp0,01 triliun, dengan total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp1,70 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp1,70 triliun (Grafik 5.1). *Net inflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa masuknya uang kartal dari masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia lebih tinggi dari kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *outflow* pada triwulan III 2024 mengalami kenaikan sebesar 26,52% (yoy). Sementara itu, *inflow* tercatat turun sebesar -20,38% (yoy) (Grafik 5.2). Nilai *outflow* yang mengalami penurunan pada triwulan laporan sebesar -44,49% (qtq) sama dengan pola historis tahun 2023 dimana *outflow* pada triwulan kedua lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan nilai *inflow* yang juga mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -32,37% (qtq).

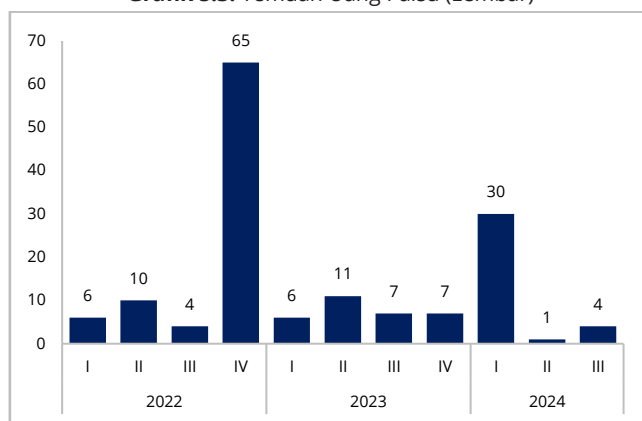
Grafik 5.2. Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kualitas peredaran uang kartal tetap terjaga. Temuan uang yang diragukan keasliannya (palsu) pada triwulan laporan tercatat meningkat terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni sebanyak 4 lembar yang ditemukan terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 lembar dan Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar. (Grafik 5.3).

Grafik 5.3. Temuan Uang Palsu (Lembar)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

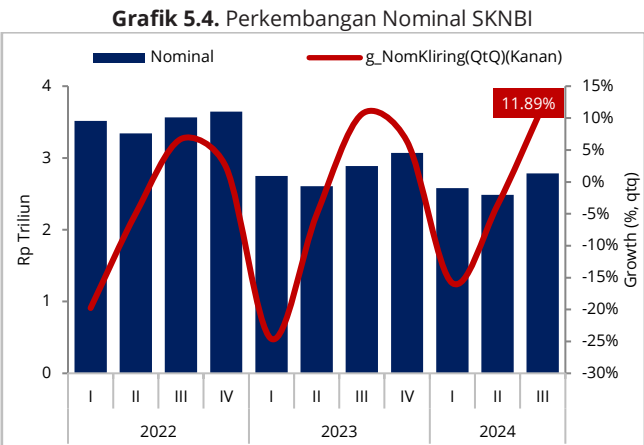
Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dari sisi volume menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri

¹ Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih

kecil dari aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

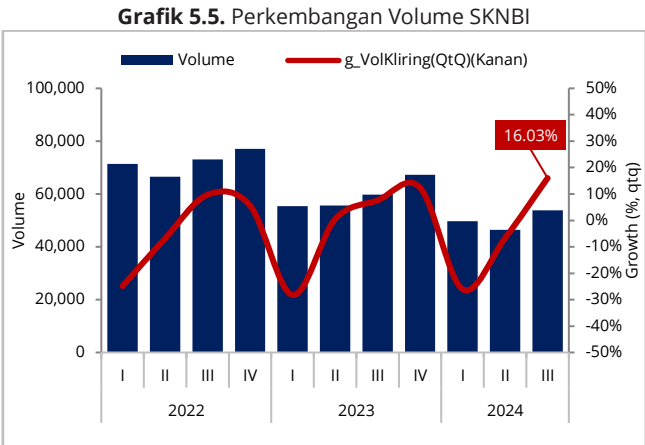
menggunakan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit/ATM tercatat mengalami pertumbuhan secara agregat dalam transaksi. Begitu juga dengan penggunaan instrumen Uang Elektronik, baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Secara umum, sistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

Transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan III 2024 naik dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan tumbuh sebesar 11,89% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp2,49 Triliun (Grafik 5.4).



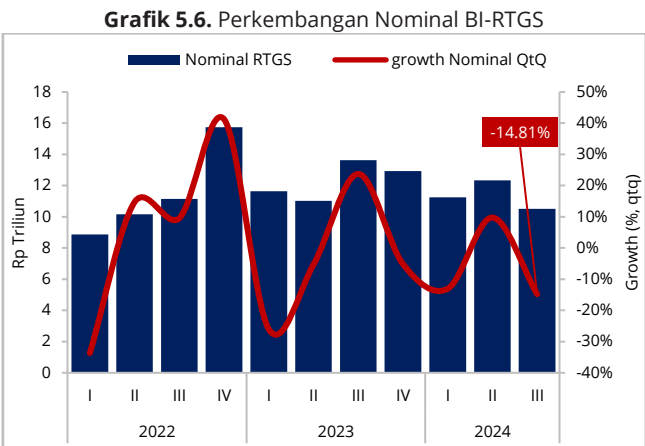
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume/frekuensi transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan naik dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 53.832 Data Keuangan Elektronik (DKE) atau turun sebesar -9,99% (yoy). Volumen transaksi SKNBI lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 yang tercatat sebanyak 46.395 atau naik sebesar 16,03% (qtq) (Grafik 5.5).



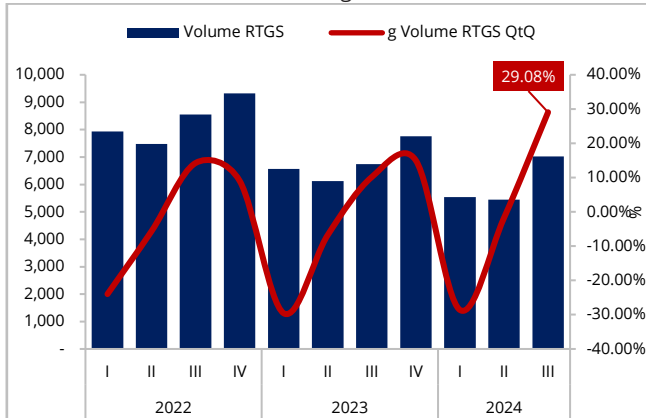
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan sistem pembayaran nilai besar dalam Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) secara nominal tercatat meningkat pada periode laporan. Transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp10,51 triliun atau turun sebesar -22,90% (yoy). Sementara jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan turun sebesar -14,81% (qtq) dibandingkan triwulan II 2024 yang tercatat sebesar Rp12,34 triliun (Grafik 5.6).



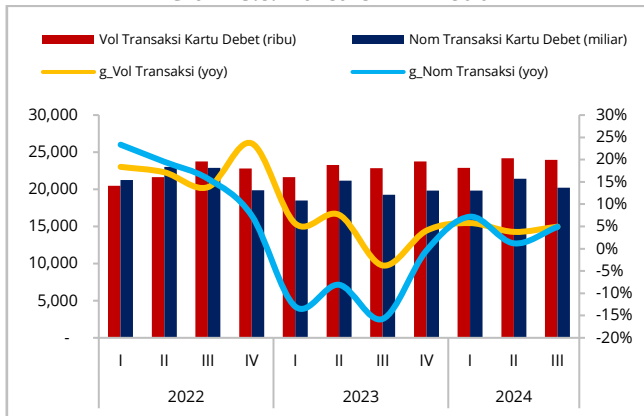
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume/frekuensi transaksi BI-RTGS juga mengalami penurunan pada triwulan laporan. Pada triwulan laporan volume/frekuensi transaksi naik sebesar 4,11% (yoy). Sebanyak 7.023 transaksi dilakukan pada triwulan laporan. Volume/frekuensi naik sebesar 29,08% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya tercatat sebanyak 5.441 transaksi dilakukan (Grafik 5.7).

Grafik 5.7. Perkembangan Volume BI-RTGS

Sumber: Bank Indonesia, diolah

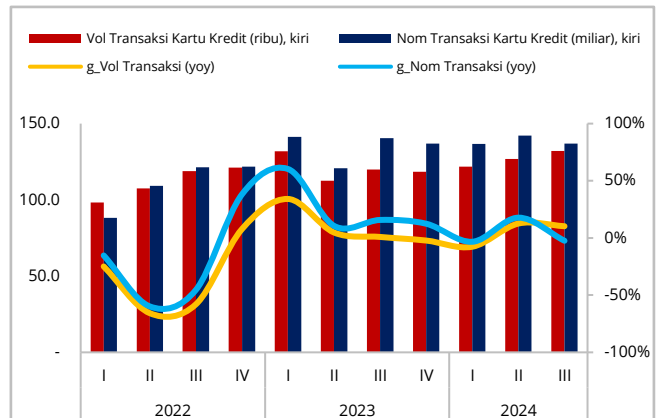
Selanjutnya, dari sisi kartu ATM/debit, volume transaksi pada triwulan III 2024 tercatat meningkat sebesar 4,95% (yoy) menjadi 23,97 juta transaksi, (Grafik 5.8). Sementara nominal transaksi ATM/debit tercatat sebesar Rp20,23 Triliun atau tumbuh sebesar 4,90% (yoy). Kartu ATM/debit mayoritas digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas tarik/setor tunai dengan nominal transaksi sebanyak Rp19,04 triliun (79,44%).

Grafik 5.8. Transaksi ATM Debit

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu dari sisi kartu kredit, volume transaksi meningkat sebesar 10,26% (yoy) atau sebesar 132.154 transaksi (Grafik 5.9). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp136,99 miliar atau turun sebesar 2,45% (yoy).

Selama triwulan III 2024, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp132,17 miliar atau 96,49% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 127.725 transaksi atau 96,65% dari total volume transaksi.

Grafik 5.9. Transaksi Kartu Kredit

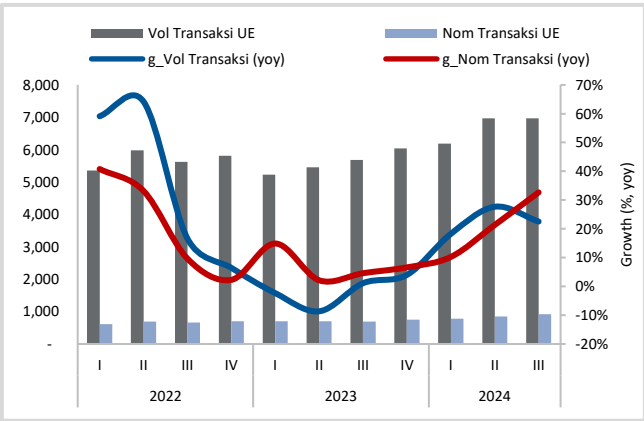
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan III 2024 mencapai Rp915,67 miliar, atau meningkat sebesar 32,67% (yoy). Sementara volume transaksi UE meningkat sebesar 22,53% (yoy) atau sebanyak 6,97 juta transaksi selama triwulan III 2024 (Grafik 5.10). Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce* selama masa pandemi. Selama triwulan III 2024, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp622,70 miliar atau 68,03% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 5,51 juta transaksi atau 79,09% dari total volume transaksi.

Transaksi UE berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian*

Standard (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless* untuk meminimalisir risiko penularan Covid-19. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

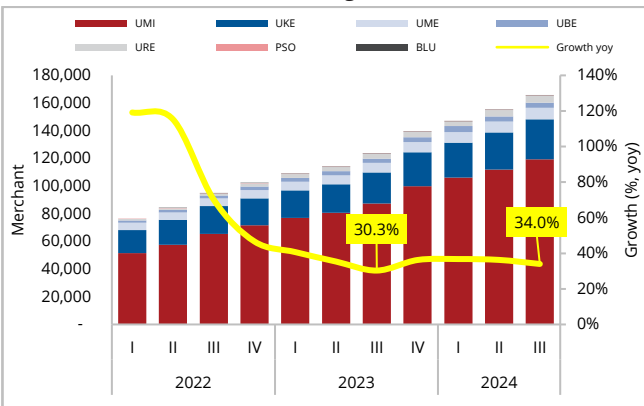
Grafik 5.10. Perkembangan Transaksi UE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Hingga triwulan III 2024, terdapat 165.614 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.11). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 34,0% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 123.583 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 8,4% (qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 160.870 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 119.411 *merchant* (72,11%).

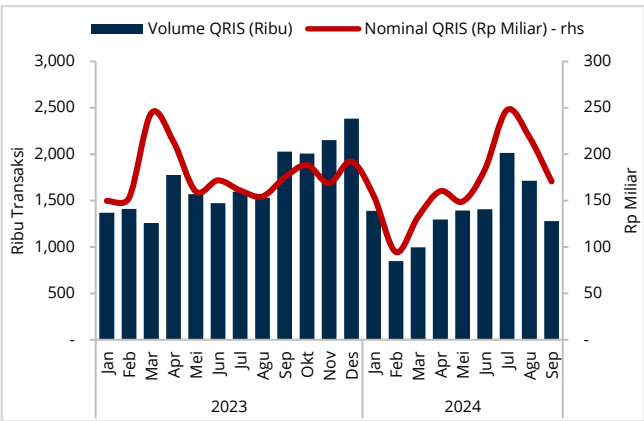
Grafik 5.11. Perkembangan Merchant QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan III 2024 telah terdapat 626.153 pengguna atau bertambah sebanyak 39.645 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan III 2024 terdapat 5,01 Juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp636,71 miliar.

Grafik 5.12. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (valas). Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan valas yang sehat, profesional, dan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

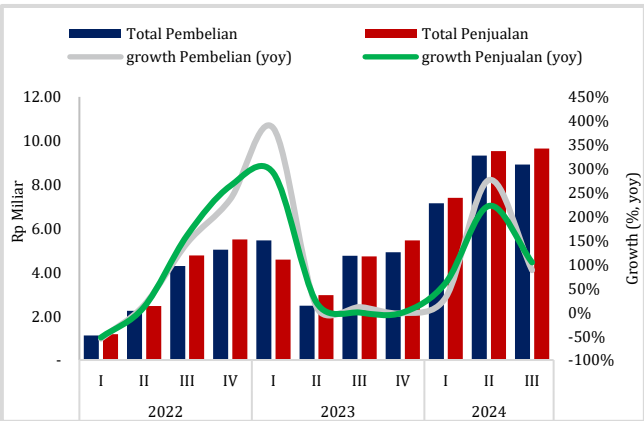
Hingga triwulan II 2024, terdapat 13 (tiga belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 5 (lima) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh meningkat jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan

meningkat sebesar 95,84% (yoy) menjadi Rp18,56 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9,48 miliar.

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 87,73% (yoy) menjadi Rp8,92 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,75 miliar. Sejalan dengan hal tersebut penjualan UKA pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan sebesar 103,99% (yoy) menjadi Rp9,64 miliar dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,73 miliar (Grafik 5.13).

Grafik 5.13. Transaksi KUPVA BB



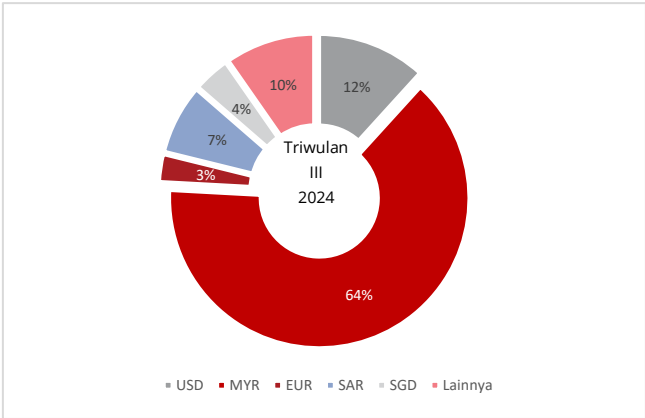
Sumber: LKPBU, diolah

Pada tanggal 29 September 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* (VoA) yang menjadi tanda kembali dibukanya rute penerbangan Internasional. Sebelumnya dalam menyelenggarakan VoA di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Hukum & HAM hanya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi pasca qanun LKS yang diterapkan di provinsi Aceh mengakibatkan BRI tidak lagi dapat memberikan layanan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh. Kesiapan mekanisme VoA di Bandara SIM tentu akan memperlancar proses perizinan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Aceh.

Sejalan dengan telah dibukanya VoA di Bandara SIM, saat ini telah terdapat 3 maskapai penerbangan yang membuka rute internasionalnya di Aceh. Air

Asia menjadi maskapai pertama yang membuka rute internasional pasca pandemi Covid-19. Pada 3 Oktober 2022 Air Asia resmi membuka kembali rute Aceh – Kuala Lumpur, dan disusul oleh Batik Air dan Fire Fly yang membuka rute Aceh – Penang. Dan saat ini rute Air Asia dari/ke Kuala Lumpur telah terbang secara reguler setiap harinya. Terakhir Super Air Jet juga telah membuka rute dari/ke Kuala Lumpur.

Grafik 5.14. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Kedepannya transaksi penukaran UKA diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kembali dibukanya rute penerbangan Internasional oleh beberapa maskapai penerbangan internasional.

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 64,11% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 11,74% (Grafik 5.14). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyelenggarakan *capacity building* kepada seluruh pedagang valuta asing berizin di Provinsi Aceh. Tujuan dari *capacity building* ini adalah agar seluruh pedagang valuta asing dapat lebih memahami potensi penyalahgunaan valuta asing baik sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme sekaligus menjalankan langkah mitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan

melalui Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan memahami secara lebih dalam terkait risiko yang ada dan bagaimana mekanisme pelaporannya, diharapkan kewaspadaan setiap pedagang valuta asing akan lebih meningkat utamanya mengenai profil *customer*.

5.4. Penyaluran Program Sembako dan PKH

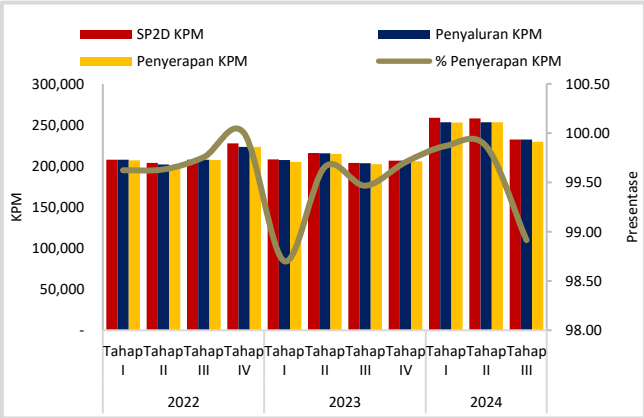
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran BSNT, Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan,

bantuan PKH Tahap III tahun 2024 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 99,99% kepada KPM (Grafik 5.15). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap III tercatat sebanyak 229.561 atau telah mencapai 98,91% dari target jumlah penerima sebanyak 232.081 KPM.

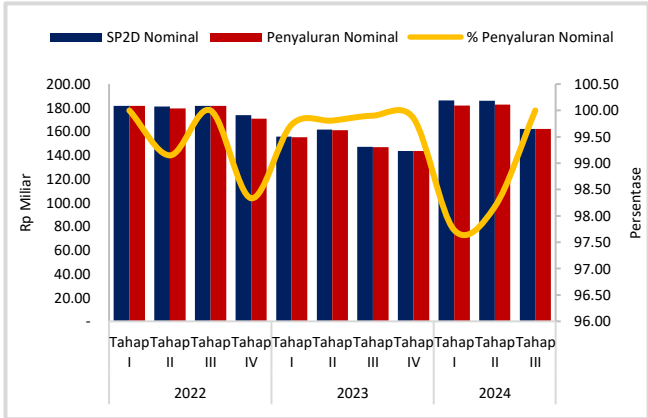
Grafik 5.15. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada triwulan III 2024, nominal bantuan yang disalurkan sebesar Rp162,06 miliar dengan persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 99,99% (Grafik 5.16). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yaitu Rp182,64 miliar.

Grafik 5.16. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

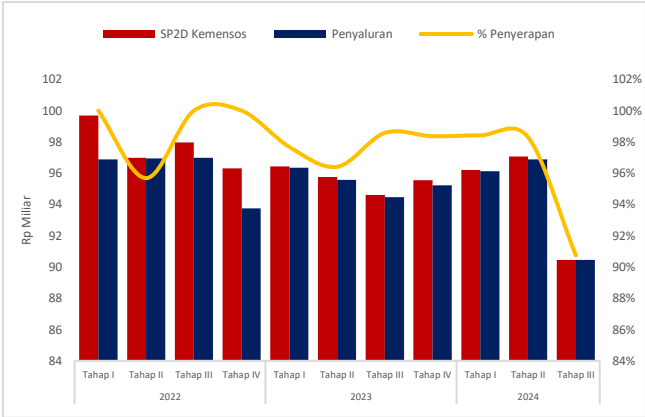
Sementara itu, penyaluran bantuan Program Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat

terbatas penanggulangan pandemi Covid-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000/bulan/KPM hingga triwulan laporan. Dalam rangka membantu meringankan dampak pandemi Covid-19, pada bulan Desember 2021 Pemerintah memberikan tambahan 2 (dua) bulan bantuan Program Sembako. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Pada triwulan III 2024, nominal bantuan yang disalurkan Program Sembako sebesar Rp90,45 miliar dengan persentase nominal penyaluran Program Sembako telah mencapai 90,74% (Grafik 5.17). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yaitu Rp96,87 miliar.

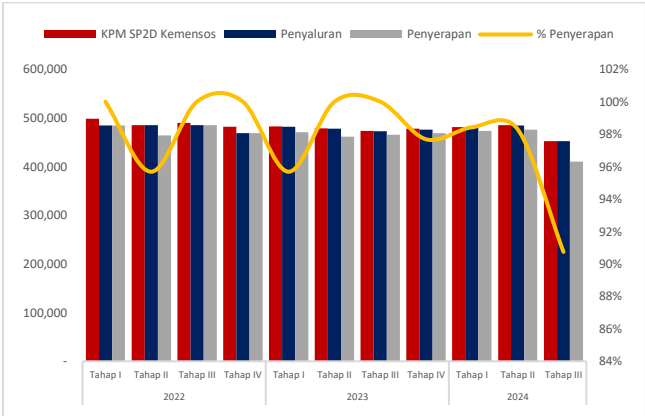
Sementara itu, jumlah KPM program sembako pada triwulan laporan mengalami penurunan menjadi 452 ribu KPM dari jumlah KPM posisi Juni 2024 sebanyak 485 ribu KPM (Grafik 5.18).

Grafik 5.17. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.18. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh masih berada pada urutan ketiga, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2024 tercatat 5,75%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,03%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,11%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,77%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan dalam memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



TINGKAT PENGANGGURAN %

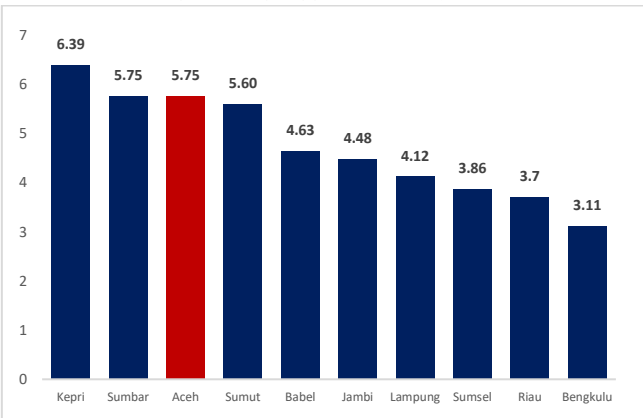
Agustus 2023 6,03%

Agustus 2024 5,75%

Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang disertai dengan peningkatan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja, yaitu mencapai 2,6 juta orang (65,11%).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, TPT di Provinsi Aceh menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi yang sama seperti Sumatera Barat.

Penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh turut didukung oleh berbagai faktor, termasuk pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024. Kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja di sektor konstruksi untuk pembangunan dan perbaikan *venue* pertandingan, serta sektor pendukung lainnya. Penurunan ini juga merupakan hasil dari berbagai upaya yang terintegrasi, seperti program pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2023	2024
	Agustus	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.604	2.661
Pengangguran	157	153
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	64,77	65,11
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	6,03	5,75

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Februari 2024 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	37,92
Perdagangan Besar & Eceran	15,32
Industri Pengolahan	7,23
Konstruksi	7,15
Jasa Pendidikan	7,13
Administrasi Pemerintahan	6,39
Akomodasi dan Makan Minum	5,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	2,53

Sumber: BPS, diolah

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar, yaitu mencapai 37,92%. Selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran (15,32%), Industri Pengolahan (7,23%), Konstruksi (7,15%), dan Jasa

Pendidikan (7,13%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 34,62%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan SD ke Bawah sebesar 24,90%, SMP sebesar 18,65%, perguruan tinggi sebesar 14,18%, SMK sebesar 4,29%, dan diploma sebesar 3,36%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2023.

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Agustus	Agustus
	2023	2024
Sekolah Menengah Atas	32,65	34,62
Sekolah Dasar ke Bawah	26,08	24,90
Sekolah Menengah Pertama	19,92	18,65
Diploma IV, S1, S2, S3	13,13	14,18
Sekolah Menengah Kejuruan	4,69	4,29
Diploma I/II/III	3,53	3,36

Sumber: BPS, diolah

Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan didominasi status pekerjaan Buruh/Karyawan/Pegawai dengan porsi sebesar 36,65%. Sementara itu, status pekerjaan dengan porsi terkecil, yaitu berstatus Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 4,18%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 60,17%, sedangkan kegiatan formal sebanyak 39,83%. Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan 0,31% dan pada

kegiatan informal mengalami peningkatan sebesar 0,31%.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Agustus	Agustus
	2023	2024
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	35,92%	36,65
Berusaha Sendiri	25,61%	25,73%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	13,21%	12,96%
Pekerja Keluarga	11,58%	11,13%
Pekerja bebas di pertanian	4,79%	5,30%
Pekerja bebas di nonpertanian	4,67%	5,05%
Berusaha dibantu buruh tetap	4,22%	4,18%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ (NTP) pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, NTP tercatat sebesar 122,08 atau mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya sebesar 118,91. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat daya beli petani. NTP yang melampaui 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Peningkatan NTP terjadi di Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) dan Subsektor Perikanan (NTPN).

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani



NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Triwulan II 2024 118,91

Triwulan III 2024 122,08 ▲

Sumber: BPS, diolah

6.2. Kemiskinan

Berdasarkan data terakhir, persentase kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 14,23%, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023 sebesar 14,45%. Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh

⁴ Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

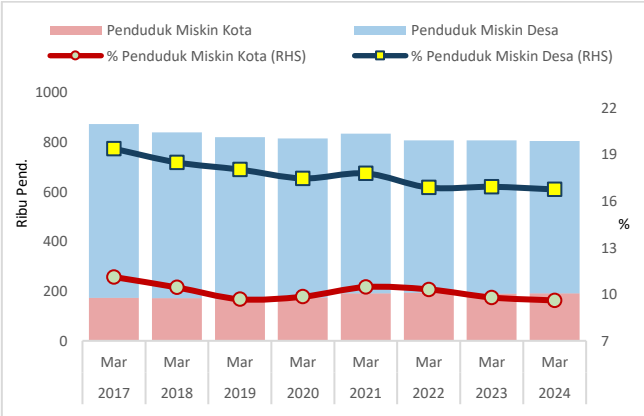
penurunan kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan, di mana persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan menurun masing-masing dari 16,92% dan 9,79% pada periode sebelumnya, menjadi 16,75% dan 9,60%.

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada posisi Maret 2024 sebanyak 804,53 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 806,75 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 0,58% (yoy) dari sebelumnya 617,56 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 613,98 ribu jiwa pada Maret 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat terbatas sebesar 0,73% (yoy), dari sebelumnya 189,16 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 190,55 ribu jiwa pada Maret 2024.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh semakin membaik, perlahan meningkatkan optimisme pemulihan pasca pandemi yang diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia per Agustus 2024, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih berada di atas 100, yaitu 144,86 dan 103,71. Hal ini mengindikasikan masyarakat optimis akan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di saat ini.

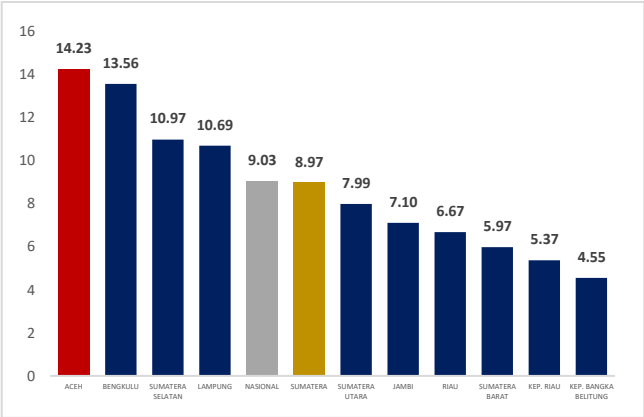
Data tingkat kemiskinan pada Maret 2024 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dengan persentase sebesar 14,23%. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera (8,97%) dan Nasional (9,03%).

Grafik 6.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.3. Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan persentase kemiskinan juga turut memengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil survei di Provinsi Aceh, pada periode September 2023 – Maret 2024, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 5,37% (yoy) sehingga pendapatan per kapita per bulan menjadi Rp661.227,- dari sebelumnya sebesar Rp627.534,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan yakni sebesar Rp501.403,- per kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp159.824,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah komoditas makanan dengan sumbangan sebesar 74,61% di perkotaan dan 76,58% di perdesaan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna, telur ayam ras, dan kue basah. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 25,39% di perkotaan dan 23,42% di perdesaan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan yaitu seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut dengan P1 dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan P2.

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

KEMISKINAN (%)		
MARET 2023	14,45	▼
MARET 2024	14,23	
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)		
MARET 2023	2,763	▼
MARET 2024	2,620	
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)		
MARET 2023	0,776	▼
MARET 2024	0,712	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2023 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. P1 mengalami penurunan dari 2,763 pada Maret 2023 menjadi 2,620 pada Maret 2024. Begitu pula dengan P2 yang mengalami penurunan setelah sebelumnya 0,776 pada Maret 2023 menjadi 0,712 pada Maret 2024. Turunnya nilai Indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

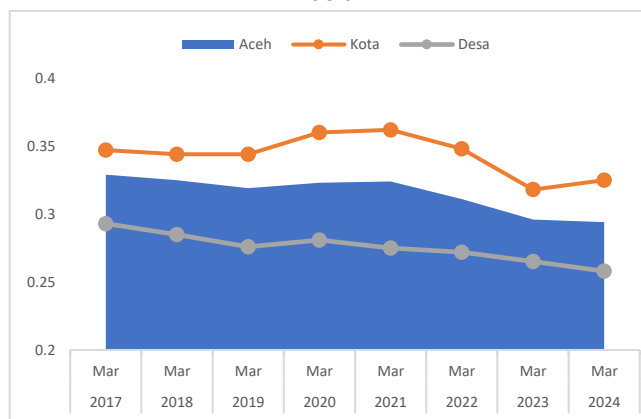
Daerah	2023		2024	
	MARET		MARET	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,932	0,545	1,581	0,401
Perdesaan	3,204	0,898	3,182	0,881
Gabungan	2,763	0,776	2,620	0,712

Sumber: Data BPS, diolah

Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada Maret 2024 sebesar 0,325, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,258. Terjadi peningkatan rasio di perkotaan dan penurunan

rasio di perdesaan pada periode Maret 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut mendorong secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi sebesar 0,296 pada Maret 2024 dari sebesar 0,294 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah

⁵Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1.Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,37%-5,17% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Sementara itu, laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Prospek terkendalinya inflasi Provinsi Aceh pada tahun 2024 didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID se-Aceh.

7.1. Prospek Makroekonomi

Di sisi global, kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh stabil dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan *World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats* oleh International Monetary Fund (IMF) pada bulan Oktober 2024, perekonomian global tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2% (yoy) (Tabel 7.1). Setelah mengalami lonjakan pertumbuhan akibat pembukaan kembali ekonomi pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju melambat signifikan pada tahun 2023. Ke depan, pertumbuhan ini diperkirakan stabil di kisaran 1,7% hingga 1,8% hingga tahun 2029. Sama seperti ekonomi negara maju, prospek pertumbuhan untuk negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang juga diperkirakan stabil dalam dua tahun ke depan, berada di kisaran 4,2%, lalu turun menjadi 3,9% pada tahun 2029.

Tabel 7.1 Global Economic Growth Outlook (%yoy)

Wilayah	2023	2024*
World Output	3,3	3,2
Advance Economies	1,7	1,8
United States	2,9	2,8
Euro Area	0,4	0,8
Japan	1,7	0,3
United Kingdom	0,3	1,1
Emerging Market	4,4	4,2
China	5,2	4,8
India	8,2	7,0

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat meningkat, tetapi ini mengimbangi penurunan proyeksi untuk negara-negara maju lainnya, terutama negara besar di Eropa. Sementara itu, di negara berkembang, gangguan produksi dan pengiriman komoditas seperti minyak, konflik, kerusakan, dan cuaca ekstrem menyebabkan penurunan proyeksi untuk kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika sub-Sahara. Namun, proyeksi di Asia justru membaik karena tingginya

permintaan semikonduktor dan elektronik, yang didukung investasi besar di bidang kecerdasan buatan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Inflasi diperkirakan terus menurun. Rata-rata inflasi global diperkirakan turun dari 6,7% pada tahun 2023 menjadi 5,8% pada tahun 2024, dan 4,3% pada tahun 2025. Penurunan inflasi diperkirakan berlangsung lebih cepat di negara maju. Inflasi di negara maju akan turun sekitar 2% dari tahun 2023 ke 2024, dan stabil di sekitar 2% pada tahun 2025. Sebaliknya, di negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang, inflasi diproyeksikan menurun lebih lambat, dari 8,1% pada tahun 2023 menjadi 7,9% pada tahun 2024, sebelum turun lebih tajam ke 5,9% pada tahun 2025.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Investasi juga diperkirakan membaik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Di samping itu, restrukturisasi ekspor yang kini lebih mengarah pada *processing product* juga diyakini dapat memperkuat struktur ekspor Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dalam kisaran 4,7%-5,5% pada 2024. Walaupun demikian, terdapat berbagai risiko yang harus diwaspadai diantaranya tantangan ekonomi global yang makin bergejolak akibat meningkatnya fragmentasi geopolitik yang terus memanas hingga saat ini.

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Nasional, ekonomi Aceh pada tahun 2024 juga diperkirakan tumbuh membaik pada kisaran 4,37%-5,17% (yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi Provinsi Aceh sebagai dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Aceh diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga,

konsumsi pemerintah, PMTB, dan ekspor luar negeri. Sedangkan dari sisi LU, laju pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh peningkatan LU Pertambangan, LU Konstruksi, serta LU Transportasi dan Pergudangan.

Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga didorong oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga turut dipengaruhi oleh inflasi yang tetap terjaga.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi Aceh berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Aceh sebesar Rp 62,01 Miliar. Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Aceh, total biaya persiapan dan penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera 2024 mencapai Rp 802,28 Miliar dengan rincian Rp 18,78 Miliar untuk keperluan non-konstruksi dan Rp 783,50 Miliar untuk keperluan konstruksi. Disisi lain, berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, terdapat peningkatan pagu anggaran APBD. Rencana anggaran belanja Aceh tahun 2024 sebesar Rp40,68 Triliun, lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp38,91 Triliun.

Pertumbuhan PMTB/investasi pada tahun 2024 diperkirakan juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Hal ini didorong oleh percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilanjutkan pada tahun 2024 diantaranya finalisasi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Bendungan Kereuto, Bendungan Rukoh, dan Daerah Irigasi Lhock Guci serta Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan. Selain pembangunan PSN, persiapan penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara 2024 juga berpotensi mendorong kinerja investasi di tahun 2024. Walaupun demikian, terdapat penghapusan beberapa proyek Jalan Tol

Trans Suamtera (JTTS) di Provinsi Aceh dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Jalan Tol Langsa-Lhokseumawe dan Lhokseumawe-Sigli yang berpotensi menahan laju PMTB pada tahun 2024.

Kinerja ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh normalisasi harga komoditas ekspor utama Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia, harga batu bara tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan dari 88,35 USD/metric ton pada 2023 menjadi 76,30 USD/metric ton pada tahun 2024. Harga kopi arabika diperkirakan mengalami peningkatan menjadi BRL 1.277,92/bag pada tahun 2024 dibandingkan BRL 952,50/bag pada tahun 2023. Lebih lanjut, harga CPO diperkirakan sedikit menguat menjadi USD 851,79/metric ton pada tahun 2024 dibandingkan USD 899,17/metric ton pada tahun 2023.

Dari sisi LU, perkiraan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 utamanya didorong oleh positifnya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, LU Konstruksi, serta LU Pertambangan. Secara umum, perkiraan kinerja positif pada LU Transportasi dan Pergudangan didukung oleh penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 yang berpotensi mendorong mobilitas masyarakat baik dari dalam maupun luar Aceh. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan membaik sejalan dengan perbaikan harga komoditas batubara dan dicabutnya larangan ekspor komoditas batubara.

LU Perdagangan diperkirakan masih tumbuh tinggi. Hal ini didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024. Walaupun demikian, kinerja LU Perdagangan akan sedikit terdeselerasi akibat adanya risiko inflasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan dari tahun

sebelumnya. Kinerjanya yang membaik sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024. Dari sisi angkutan udara, tren peningkatan penerbangan domestik diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2024.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh diperkirakan sedikit terdeselerasi pada kisaran 3,86%–4,66% (yoy) terutama didorong oleh penurunan kinerja komponen permintaan domestik. Dari sisi permintaan, komponen konsumsi rumah tangga akan sedikit melambat karena *base effect* pertumbuhan yang tinggi pada tahun sebelumnya karena penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilu 2024. Walaupun demikian, inflasi yang lebih stabil pada tahun 2025 diperkirakan dapat menahan penurunan kinerja konsumsi rumah tangga. Komponen PMTB diperkirakan terdeselerasi sejalan dengan PSN yang sudah memasuki tahap penyelesaian, dan adanya penghapusan beberapa proyek dari nomenklatur PSN. Komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi pemerintah juga diperkirakan melambat sejalan dengan pengurangan dana otonomi khusus (Otsus) menjadi 1% pada tahun 2025 serta normalisasi pertumbuhan dari tahun sebelumnya.

Dari sisi penawaran, pada tahun 2025 pertumbuhan output LU Pertanian diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut terutama didorong optimalisasi irigasi sejalan dengan telah selesainya pembangunan Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh pada tahun 2024. Selanjutnya, pertumbuhan output LU Transportasi dan Perdagangan diperkirakan akan sedikit terdeselerasi sejalan dengan penurunan mobilitas dibandingkan tahun 2024 yang memiliki kegiatan besar seperti Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Sementara itu, LU Konstruksi juga diperkirakan melambat sejalan dengan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024 dan dihapuskannya beberapa proyek dari nomenklatur Proyek Strategis Nasional (PSN).

7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan prakiraan dari *The International Monetary Fund* (IMF), inflasi global diperkirakan menurun dari 6,7% (yoy) pada 2023 menjadi 5,8% (yoy) pada 2024 dan kembali menurun menjadi 4,3% (yoy) pada 2025. Angka tersebut masih berada di atas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Inflasi diperkirakan melambat sejalan dengan penurunan harga komoditas pangan dan energi. Sementara itu, inflasi domestik diperkirakan akan kembali ke dalam rentang target inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2024, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Pada tahun 2024, terjadi perubahan tahun dasar dari 2018 menjadi 2022 dan penambahan 2 kota IHK baru di Provinsi Aceh yaitu Kab. Aceh Tengah dan Kab. Aceh Tamiang. Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode Oktober 2024 tercatat sebesar 1,69% (yoy). Inflasi diperkirakan akan tetap terjaga hingga akhir tahun sesuai sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy) didukung oleh penurunan harga tiket pesawat domestik di akhir tahun dan stabilitas harga komoditas pangan.

Dari sisi komoditas bahan makanan, terdapat risiko efek pergeseran musim panen akibat El Nino yang terjadi pada tahun 2023 khususnya untuk komoditas beras yang masih terus naik hingga saat ini. Sementara dari sisi barang yang harganya diatur oleh Pemerintah, terdapat risiko kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen dan cukai rokok elektrik sebesar 15 persen pada 2024. Penetapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 dan 192 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192/PMK.010/2021. Selain itu, terdapat juga risiko kenaikan inflasi tahunan akibat kenaikan tarif PDAM sebesar 30% di Banda Aceh yang berpotensi mendorong inflasi sisi barang yang harganya diatur oleh Pemerintah.

Inflasi Provinsi Aceh pada 2024 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Walaupun demikian, berbagai program yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh seperti GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) terus dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Selanjutnya, strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus digalakkan dalam rangka mengendalikan inflasi agar tetap berada pada sasaran $2,5\% \pm 1\%$.

Prospek inflasi pada tahun 2025 diperkirakan masih tetap terjaga pada kisaran target $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi pada kelompok pangan diperkirakan masih dapat terkendali sejalan dengan koordinasi aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan. Inovasi produksi komoditas pangan, termasuk penerapan digitalisasi, dan hilirisasi sektor pertanian perlu terus didukung dengan sinergi yang baik seluruh pihak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa risiko tekanan inflasi, diantaranya potensi peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat mendorong kenaikan harga pada komoditas inflatoir.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. **Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan lapangan usaha Industri Pengolahan.** Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar dapat diidentifikasi

potensi dari masing-masing komoditas unggulan dalam penciptaan nilai tambah. Hal ini penting agar Provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan melalui industri pengolahan.

2. **Mengurangi tingginya angka kemiskinan Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja** melalui langkah taktis replikasi *piloting* pengembangan kelompok subsisten melalui sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam usulan *piloting* tersebut, antara lain: (i) *Initial assessment*: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan *initial assessment* terkait kelompok potensial yang akan dilakukan *piloting* pengembangan kelompok subsisten; (ii) *Implementing partner*: Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), DPMG bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) identifikasi *implementing partner* yang potensial di Aceh (industri yang mampu menjadi *off-taker*) termasuk potensi pemanfaatan BUMG di gampong-gampong; (iii) Pendampingan: BI, OJK, Kemenkeu dan OPD teknis melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha kepada kelompok subsisten terpilih dengan pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan; (iv) Pendampingan (lanjutan): fasilitasi promosi produk dari *implementing partner* daerah; (v) Monev: monitoring dan evaluasi pelaksanaan oleh seluruh pihak terkait; dan (vi) Replikasi: replikasi *success story* dapat dilakukan di kabupaten/kota lainnya.
3. **Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.** *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai

aktivitas perekonomian yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan permodalan, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.

4. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut dinilai belum dioptimalkan dengan baik. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.
5. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMi di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2024.
6. **Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri.** Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang bisa menjadi rumah produksi

bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM.

7. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Transaksi non tunai/digital juga diperkirakan akan terus meningkat pasca pandemi sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) juga perlu diakselerasi melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perbankan, serta pihak terkait lainnya.
8. **Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU)* Aceh.** Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor potensial.

Inflasi

Pada tahun 2024, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipatif yang bersifat struktural maupun *seasonal* untuk mengendalikan inflasi agar berada pada sasaran yang ditetapkan

2,5%±1%. TPID Provinsi Aceh secara konsisten melakukan berbagai program pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K, antara lain:

1. **Ketersediaan Pasokan** antara lain melalui aktivitas peningkatan produksi di daerah sentra dengan optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan, penerapan *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu untuk mendukung peningkatan produksi dan menjaga pasokan, serta mengakselerasi program KAD untuk komoditas pangan strategis antara daerah sentra dan non sentra.
2. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis yaitu**, dengan melanjutkan program sinergi operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan secara terjadwal dan serentak. Di samping itu, melaksanakan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
3. **Kelancaran Distribusi melalui peningkatan konektivitas antar daerah**. Peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan diantaranya dilakukan melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi kerjasama UMKM pangan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *cold storage* untuk komoditas perikanan.
4. **Komunikasi Efektif melalui peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah, peningkatan kapasitas dan koordinasi TPID Provinsi dan Kab/Kota, serta penguatan pengendalian ekspektasi inflasi**. Peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah yakni, dengan pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) sebagai referensi dalam rekomendasi kebijakan, Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta

jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan dengan bersinergi dengan media dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat.

5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh** secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) seperti belanja bijak berbelanja maupun himbauan pemanfaatan sumber pangan alternatif.
6. **Mewujudkan ketahanan pangan di Aceh** untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian berkelanjutan dengan penerapan ekonomi sirkular. Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi *scheduling* tanam, dan penyimpanan. i) Kemandirian Pupuk (Petani) dilakukan melalui pengembangan pupuk organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*). Dibutuhkan kapasitas, standarisasi dan legalitas yang cukup serta mumpuni untuk pengembangannya. Salah satu contoh implementasinya melalui pengembangan pupuk dengan dekomposer. ii) Kemandirian Bibit (Produsen bibit), bibit cabai merah keriting (CMK) yang dikenal dengan udeng atau odeng dan cabai merah varietas Bemerah adalah varietas cabai lokal unggul berasal dari Kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh. Permasalahan yang muncul dalam proses pembibitan varietas lokal di atas adalah masih terbatasnya petani di Aceh yang membudidayakan varietas tersebut. Selain itu, kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik.

Masih perlu dilakukan pemuliaan tanaman agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas. Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah. Begitu pun untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor. iii) Informasi *scheduling* tanam, dilakukan dengan menghubungkan info antara pedagang besar yang mengendalikan pasar dan pedagang pengepul di daerah pertanian yang menjadi pemasok komoditas tersebut. Selanjutnya, pedagang pengepul meneruskan info tersebut ke petani untuk dilakukan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, iv) penyimpanan, khususnya untuk komoditas pangan yang perlu didukung *cold supply chain*, yaitu suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen komoditas pertanian. Penyimpanan cadangan pangan dapat digunakan untuk mempertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD).

7. **Mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan Stabilisasi Suplai Gabah untuk Menjaga Inflasi Komoditas Beras.** Pasokan beras kerap kali didatangkan dari luar Aceh pada periode-periode tertentu. Padahal jika dihitung secara tahunan, produksi beras Aceh mengalami surplus. Gabah dari Aceh dijual ke Sumatera Utara untuk diolah, kemudian beras dijual kembali ke Aceh. Kondisi ini menyebabkan harga beras dapat meningkat/lebih tinggi daripada harga lokal. Beras lokal berpotensi untuk kalah saing dengan beras luar yang kualitasnya lebih baik dan berdampak pada berkurangnya pendapatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan hilirisasi produk tanaman pangan

terutama padi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Lebih lanjut, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan di Provinsi Aceh. KAD dapat dilakukan dalam berbagai komoditas pangan mempertimbangan surplus dan defisit komoditas pangan di Provinsi Aceh.

DAFTAR ISTILAH

Administered prices	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Rony Widiarto P.

KOORDINATOR PENYUSUN

Hendy Hadiyan

TIM PENULIS

Hafidz Yudhansyah

M. Indra Saputra

Imam Wahyudi

M. Fikrisani

Irfan Bagus Rachmanto

Handoko

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

Softcopy dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Aceh-November-2024.aspx>.